

**ANALISIS RESPONS KOREA SELATAN TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBATASAN EKSPOR OLEH JEPANG PADA TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



oleh:

Winanda Aryansyah

17323055

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

ANALISIS RESPONS KOREA SELATAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBATASAN EKSPOR OLEH JEPANG PADA TAHUN 2019

Dipertahankan di Depan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal :

14 Maret 2021

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia Ketua
Program Studi



(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.
2. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Winanda Aryansyah

No. Mahasiswa : 17323055

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Respons Korea Selatan terhadap Keputusan Pembatasan Ekspor Jepang pada Tahun 2019.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain

Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 15 Maret 2021



Winanda Aryansyah

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin

Tulisan sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Papa Dan Mama

Terima Kasih atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat dan semangat yang tak terhingga, yang telah diberikan selama penulis menjalankan kuliah ini

Semua Keluarga Besar

Terima Kasih atas doa, semangat, nasehat dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalankan kuliah ini

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2017

Terima Kasih atas perjuangannya, saran dan bantuannya selama penulis berkuliah di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah *subhanallahu wa ta'allah* Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Atas segala nikmat, serta rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat beserta salam yang selalu diucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para jajaran pengikutnya.

Penulis menyadari dalam menulis skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dan semangat dengan sepuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, bantuan serta diberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis sehingga pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini walaupun masih terbatas oleh banyaknya kekurangan yang penulis miliki.
2. Pada dan Mama, yang setiap harinya selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal. Terima kasih juga telah memberikan kepercayaan

kepada penulis untuk bisa menjalankan kuliah di luar kota, di Universitas Islam Indonesia yang jauh dari rumah kami ini. Terima kasih atas segala yang telah diberikan hingga penulis berhasil sampai di titik ini, karena tanpa Papa dan Mama, penulis tidak akan bisa sampai ke titik dimana penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatannya selalu kepada Papa dan Mama.

3. Adik dan Keluarga besar dari penulis. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan dari awal penulis berangkat ke Yogyakarta hingga akhirnya sampai di titik ini. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan kalian.

4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D.

5. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

7. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak memberikan bantuan, saran, motivasi, waktu serta pikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur ketika mendapat kabar bahwa Bapak akan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi untuk penulis ini, Terima kasih banyak pak. Semoga Bapak sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT dan semoga Bapak sekeluarga selalu dilimpahkan rahmat serta rizki-Nya. Penulis jugamohon maaf atas

waktu yang telah dihabiskan untuk membantu penulis, dan khususnya untuk menjawab pertanyaan penulis yang sangat banyak ini pak. Terima Kasih banyak Pak Enggar.

8. Seluruh dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama berproses dalam masa perkuliahan sampai saat ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Mbak Mardiatul Khasanah selaku staff prodi yang sudah sangat membantu seluruh proses administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Rafi, Ucil, Roji , Sonia, Monik, Santika, Aisyah, dan Ucok. Selaku teman-teman yang telah menemani dan banyak membantu penulis selama menjalankan kuliah di Universitas Islam Indonesia dari awal hingga akhirnya penulis bisa sampai di titik ini. Terima kasih, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, perlindungan , karunia, beserta rahmat dan rezeki oleh Allah SWT. Kakak tingkat dan teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas waktu dan bantuan yang telah kalian berikan kepadad penulis. Terima kasih, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rahmat, dan rezeki oleh Allah SWT.

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الأندو

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Signifikansi	4
E. Cakupan Penelitian	4
F. Tinjauan Pustaka.....	5
G. Landasan Teori/Konsep/Model	9
H. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	23
3. Metode Pengumpulan Data	23
4. Proses Penelitian.....	24
BAB II	25
ANALISIS RESPONS KOREA SELATAN MENGGUNAKAN SETTING INTERNAL DAN <i>SOCIAL STRUCTURE & BEHAVIOR</i>	25
A. <i>Non-human environment</i>	25
B. <i>Society</i>	32
C. <i>Human Environment</i>	36
D. <i>Social Structure and Behavior</i>	40
BAB III.....	52
ANALISIS RESPONS KOREA SELATAN MENGGUNAKAN SETTING EKSTERNAL.....	52

A. <i>Non-human Environment</i>	52
B. <i>Other Cultures</i>	61
C. <i>Other Societies</i>	66
D. <i>Societies Organized and Functioning as States and Government Action</i>	69
BAB IV	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	79
Daftar Pustaka	80



DAFTAR TABEL

<i>Flowchart Snyder</i> untuk menggambarkan bagaiman alur setting internal dan setting internal dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara.....	11
<i>Flowchart Snyder</i> untuk menjelaskan bagaimana indikator analisis dalam <i>Decission Making Theory</i> mempengaruhi kebijakan suatu negara.....	15
<i>Flowchart Snyder</i> untuk membantu menjelaskan logika analisis penelitian.....	76



DAFTAR SINGKATAN

MA : Mahkamah Agung

MOTIE : *The Ministry of Trade, Industry, and Energy*

WTO : *World Trade Organization*



ABSTRAK

Korea Selatan diketahui menjadi salah satu negara yang tunduk dibawah pemerintah kolonial Jepang pada masa Perang Dunia II. Dimana, pada masa kependudukan Jepang di Korea Selatan ini, banyak perilaku buruk yang diterima oleh rakyat Korea Selatan oleh pemerintah Jepang. Diantaranya adalah mereka yang menjadi korban dari kerja paksa atau *forced worker*, juga mereka yang menjadi korban dari *comfort women* atau *jugun ianfu*. Hal buruk yang terjadi pada masa Perang Dunia II ini, kemudian menjadi masalah tersendiri bagi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang di masa sekarang, yang mana hubungan kedua negara ini akan cenderung mengarah ke arah yang lebih negatif ketika isu ini kembali dibahas. Hubungan Korea Selatan dan Jepang ini kemudian mulai memburuk yang puncaknya adalah pada tahun 2019, ketika Jepang memutuskan untuk membatasi ekspor beberapa bahan kimia, yang dibutuhkan Korea Selatan sebagai bahan baku dari industri *smartphone* mereka. Selanjutnya, penelitian ini akan lebih lanjut membahas terkait bagaimana proses pengambilan kebijakan Korea Selatan yang dikeluarkan sebagai respons dari keputusan Jepang ini, menggunakan konsep *setting* internal dan *setting* eksternal dari *Decision Making Theory*.

KATA KUNCI : Korea Selatan, Pembatasan ekspor, Jepang, Isu Perang Dunia II, *setting* internal, *setting* eksternal.

ABSTRACT

South Korea is known to be one of the countries that vail to the Japanese colonial government during World War II. During this Japanese occupation of South Korea, there were many bad behaviors that were accepted by the South Korean people by the Japanese government. Among them are those who are victims of forced workers, as well as those who are victims of comfort women or jugun ianfu. This bad things that happened during World War II then become a problem for relations between South Korea and Japan today, where the relationship between the two countries will tend to lead to a more negative direction when this issue is discussed again. The relationship between South Korea and Japan then began to deteriorate, which culminated in 2019, when Japan decided to limit their exports of several chemicals, which South Korea needed as raw materials for their smartphone industry. Furthermore, this study will further discuss how the South Korean policy-making process issued as a response to this Japanese export limitation decision, uses the concept of internal settings and external settings from *Decision Making Theory*.

Keyword : South Korea, Export limiatation, Japan, World War II Issue, Internal setting, External setting.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asia Timur merupakan salah satu kawasan di benua Asia dengan dinamika hubungan internasional yang menarik. Dinamika hubungan internasional yang terjadi di kawasan ini tidak terjadi di masa modern saja, tetapi sudah terjadi sejak masa Kekaisaran berlangsung di kawasan tersebut. Dinamika hubungan internasional di Asia Timur yang sudah terjadi sejak masa Kekaisaran di kawasan tersebut, beberapa diantaranya adalah hubungan saling beraliansi maupun saling serang antara Kekaisaran-kekaisaran yang berdiri di negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang. Tulisan ini sendiri secara spesifik akan membahas mengenai dinamika hubungan antara Korea yang lebih tepatnya adalah Korea Selatan dengan Jepang. Diketahui, Korea Selatan dan Jepang memiliki hubungan yang sangat dinamis hingga saat ini. Hal tersebut, tidak terlepas dari apa yang terjadi kepada rakyat Korea Selatan, pada saat Jepang menduduki wilayah tersebut pada masa Perang Dunia II.

Kependudukan Jepang di Korea Selatan pada masa Perang Dunia II, tentu saja diwarnai dengan banyak kejadian tidak menyenangkan yang hingga saat ini masih menjadi luka tersendiri bagi rakyat Korea Selatan. Salah satu masalah dari masa Perang Dunia II yang saat ini masih menjadi penghalang untuk terciptanya hubungan harmonis antara Korea Selatan dan Jepang, adalah isu *forced forker* atau pekerja paksa. Pada masa Perang Dunia II, karena perang yang terus berlanjut antara Jepang dengan Tiongkok, menyebabkan pihak Jepang mengalami masalah kekurangan pekerja. Hal ini yang kemudian menyebabkan Jepang harus

mendatangkan sejumlah pekerja dari daerah kependudukan mereka, untuk mengatasi masalah tersebut. Para pekerja yang didatangkan oleh Jepang ini, termasuk orang-orang yang didatangkan dari Semenanjung Korea, yang pada saat itu menjadi wilayah yang diduduki oleh Jepang. Para ahli memperkirakan ada sekitar 700.000 hingga 800.000 orang yang dibawa dari Semenanjung Korea untuk dipekerjakan pada saat itu (Yoshida, 2019).

Pada akhir Oktober tahun 2018 yang lalu, Mahkamah Agung Korea Selatan membuat keputusan untuk menuntun beberapa perusahaan asal Jepang untuk membayar sejumlah uang ganti rugi atas Kerja Paksa yang dilakukan Jepang pada masa Perang Dunia II (Jaewon, 2018). Menurut Jepang, isu ini seharusnya tidak diangkat lagi, karena menurut mereka telah selesai dengan adanya perjajian pada tahun 1965 dan banyak permintaan maaf yang telah disampaikan Jepang kepada Korea. Namun, Korea Selatan belum puas akan perlakuan Jepang tersebut. Korea Selatan menilai perlakuan Jepang tersebut tidak dilakukan dengan dasar ketulusan. Karena itulah, Korea Selatan menuntut perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi kepada warga negaranya yang menjadi korban pada masa kependudukan Jepang dari tahun 1910 sampai 1945 (Keeho, 2019). Sebagai respon tidak puas akan hal tersebut, Jepang pun kemudian mengambil keputusan untuk memperketat dan membatasi ekspor tiga bahan baku utama yang kerap digunakan Korea Selatan untuk memproduksi *smartphone* (Obayashi, 2019).

Keputusan pembatasan ekspor yang diambil oleh pemerintah Jepang ini kemudian menimbulkan gejolak baru pada hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Dimana, keputusan Jepang ini melibatkan kedua negara tersebut berada dalam situasi yang dikenal dengan nama Perang Dagang. Perang Dagang sendiri

didefinisikan sebagai peningkatan proteksionisme perdagangan melalui mekanisme tarif dan non-tarif, seperti kenaikan pajak impor dan subsidi ekspor (Lau, 2018, hal. 4). Perang Dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan ini, menurut Penulis menarik untuk dibahas. Hal tersebut, mengingat Jepang dan Korea Selatan sendiri memiliki posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang besar di Asia.

Perang Dagang yang terjadi antara Korea Selatan dengan Jepang ini, menurut penulis sangat menarik untuk dibahas. Karena, isu terkait Perang Dunia II, merupakan isu yang sangat sensitif dalam hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Disamping itu, terjadinya Perang Dagang adalah dinamika baru yang terjadi pada hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang itu sendiri. Penelitian ini sendiri, ditujukan untuk melengkapi beberapa penelitian sebelumnya yang rata-rata hanya membahas tentang dinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang. Menariknya lagi, Korea Selatan adalah pihak yang mengangkat kembali isu ini. Penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan diambil Korea Selatan, sebagai bentuk respons terhadap keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengambilan kebijakan Korea Selatan dalam merespons keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang pada tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis strategi Korea Selatan dalam merespons pembatasan ekspor yang telah ditetapkan oleh Jepang.
- b. Menganalisis kebijakan yang diambil oleh Korea Selatan sebagai bentuk respons atas pembatasan ekspor yang telah ditetapkan oleh Jepang.

D. Signifikansi

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengambilan kebijakan Korea Selatan dalam merespons pembatasan ekspor yang telah ditetapkan Jepang. Mengingat keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang terhadap Korea Selatan ini adalah masalah yang baru. Maka, penulis kemudian memposisikan penelitian ini untuk melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut, dikarenakan penelitian-penelitian terdahulu yang rata-rata hanya membahas tentang dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Penelitian ini sendiri dibuat karena penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang respons Korea Selatan terhadap pembatasan ekspor oleh Jepang tersebut.

E. Cakupan Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas, fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan Korea Selatan dalam merespons keputusan pembatasan ekspor dari Jepang tersebut. Mengingat masalah ini baru saja terjadi pada tahun 2019, maka penulis akan membatasi periode yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dimana periode tersebut akan dimulai dari bulan Oktober tahun 2018, terhitung sejak Mahkamah Agung Korea Selatan menuntut beberapa perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi atas masalah Kerja Paksa pada masa Perang Dunia II, hingga rentetan respons yang

dikeluarkan oleh Korea Selatan dalam menanggapi keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang, yang dibatasi hingga Korea Selatan memutuskan untuk membawa masalah ini untuk diselesaikan di WTO (*World Trade Organization*) pada September 2019.

F. Tinjauan Pustaka

Karena fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penentuan strategi dan kebijakan yang akan dipilih oleh Korea Selatan sebagai bentuk respons dari keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang pada tahun 2019. Oleh karena itu, maka penulis akan mencoba menggunakan beberapa tulisan yang membahas tentang hubungan antara Korea Selatan dan Jepang serta beberapa hal terkait hubungan antara kedua negara tersebut dan kebijakan Korea Selatan di bidang ekonominya.

Hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, diketahui selalu memiliki dinamika yang berbeda-beda setiap tahunnya. Shale Horowitz (2016) menegaskan bahwa hubungan antara Korea Selatan dan Jepang selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, setelah Perang Dunia II berakhir. Hubungan antara Korea Selatan dan Jepang yang terus membaik ini menyebabkan keduanya menjadi rekan kerjasama di kawasan Asia Timur. Namun, beberapa dekade terakhir, hubungan keduanya mengalami kemunduran karena adanya rezim ideologis yang menitikberatkan hubungan sejarah antara kedua negara tersebut. Faktor sejarah ini cenderung menghasilkan gesekan ideologis yang dapat menyebabkan memburuknya hubungan antara Korea Selatan dan Jepang lagi, hingga terulangnya konflik bagi kedua negara ini (Horowitz, 2016, hal. 79-99).

Selanjutnya, Ja-hyun Chun (2016) menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, proses rekonsiliasi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang selalu mengalami kemunduran, baik dari tingkat masyarakat hingga pemerintahnya. Masyarakat dari kedua negara ini, dilihat sebagai pihak yang berperan aktif dalam mempengaruhi hubungan kerjasama maupun konflik dari Korea Selatan dan Jepang secara tidak langsung. Adanya sentimen terkait isu budak seks dan buku sejarah juga memiliki peran penting terkait stigma masyarakat yang juga dapat mempengaruhi kebijakan negara tentang masalah-masalah setelah Perang Dunia II. Chun juga menjelaskan dalam tulisannya ini bahwa kemunduran dalam proses rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Jepang selama beberapa tahun terakhir ini, juga disebabkan oleh banyaknya berita buatan media lokal yang kurang informasi, sehingga menyebabkan kesalahpahaman informasi yang sudah terlanjur diterima oleh masyarakat kedua negara. Dimana, pengaruh dari hal ini secara tidak langsung dapat berdampak kepada hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang itu sendiri (Chun, 2016, hal. 88-106).

Lebih lanjut, Kil J. YI (2002) menjelaskan ada beberapa isu yang masih menjadi prioritas tuntutan sebagian masyarakat Korea Selatan terhadap pemerintah Jepang terkait Perang Dunia II diantaranya masalah wajib militer, kerja paksa, hingga *Comfort Women*. Diantara beberapa prioritas tuntutan tersebut, isu *Comfort Women* adalah isu yang paling sensitif, karena para wanita Korea Selatan yang pada saat itu dijadikan sebagai budak seks dari para tentara Jepang. Masyarakat Korea Selatan, masih belum puas terkait pertanggungjawaban dan permintaan maaf yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang tersebut. Mereka menilai bahwa pemerintah Jepang masih belum memberikan pertanggungjawaban

dan permintaan maaf yang cukup bagi keluarga korban dari *Comfort Women* itu tadi (Yi, 2002, hal. 634-648).

Kemudian Hosup Kim (2011) Menjelaskan bahwa pemimpin politik memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah faktor historis yang kemudian bisa menjadi konflik secara diplomatik. Artinya, rasionalisasi dari pemimpin politik sangat perlu diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan, agar kepentingan nasional dapat dimaksimalkan. Tetapi, para pemimpin dan politisi dari Korea Selatan dan Jepang tidak selalu rasional sehingga adanya kemungkinan bahwa mereka akan membuat kebijakan yang menyangkut masalah sejarah dan bertentangan dengan kepentingan nasional. Kim, menegaskan bahwa hubungan antara Korea Selatan dan Jepang dapat diperbaiki selama para pemimpin kedua negara ini dapat membicarakan topik historisnya dengan cara yang dapat mencegah adanya perselisihan secara diplomatik (Kim, 2011, hal. 130-132).

Hubungan Korea Selatan dan Jepang juga dijelaskan juga oleh Seung Deuk Hahm & Uk Heo (2019) bahwa pada akhir 2015 pemerintahan Park Geun Hye dan Shinzo Abe telah mencapai kesepakatan yang telah dianggap final sebagai penyelesaian dari konflik panjang antar kedua negara ini. Namun, kesepakatan tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Korea Selatan karena para korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Setelah Moon Jae In resmi menjabat sebagai presiden dari Korea Selatan, ia menolak kesepakatan dengan Jepang yang telah disepakati pada masa pemerintahan sebelumnya. Menurutnya kesepakatan tersebut tidak mencerminkan tuntutan para korban, dan pemerintah Jepang harus mengambil tanggungjawab hukum dan upaya reparasi secara resmi. Hal ini juga menimbulkan penolakan kembali dari

pemerintahan Jepang, yang mengakibatkan masalah ini tetap tidak terselesaikan (Hahm & Heo, 2019, hal. 55-58).

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Hal ini ditegaskan Jonathan Krieckhaus (2017) yang dalam tulisannya menegaskan bahwa kemampuan Korea Selatan ini dapat dilihat pada upaya Korea Selatan untuk menghadapi krisis ekonomi Asia pada tahun 1998, dan bangkit dari krisis tersebut dengan sangat cepat. Bangkitnya Korea Selatan dari krisis ekonomi ini, tidak terlepas dari upaya reformasi ekonomi pada masa pemerintahan Kim Dae Jung. Beberapa kebijakan ala Kim pada reformasi ekonomi diantaranya, kebijakan untuk mengurangi subsidi pada Chaebol yang mendorong mereka untuk mandiri secara finansial, dan memberi izin kepada pembelian dari pihak asing. Kebijakan lain Kim tentang liberalisasi pasar tenaga kerja, juga menjadi salah satu faktor yang menyelamatkan Korea Selatan. Keberhasilan Kim dalam meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok, sembari memelihara hubungan baiknya dengan Amerika Serikat, juga menjadi faktor lain yang membuat Korea Selatan dapat bangkit dengan cepat setelah krisis ekonomi tersebut berlangsung (Krieckhaus, 2017, hal. 59-65).

Keberhasilan Korea Selatan melalui reformasi ekonomi ini juga dijelaskan oleh Michelle Connolly & Kei-Mu Yi (2015) yang menjelaskan tentang tiga kebijakan reformasi ekonomi dan perdagangan utama Korea Selatan pada masa pemerintahan Kim Dae Jung. Diantaranya adalah pembebasan tarif atas barang impor, pembebasan tarif atas barang yang akan dijadikan modal untuk barang ekspor, dan pengurangan tarif di berbagai sektor yang lebih luas. Dampaknya ialah negara-negara maju yang bekerjasama dengan Korea Selatan, seperti

Amerika Serikat telah menurunkan tarifnya. Pengurangan tarif ini juga memberikan dampak kepada pekerja Korea Selatan, yaitu meningkatnya GDP mereka. Jurnal ini juga menuliskan beberapa kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Kebijakan-kebijakan tersebut seperti, investasi pemerintah di bidang infrastruktur serta subsidi kredit dan pengurangan tarif pajak kepada para eksportir (Connoly & Yi, 2015, hal. 188-215).

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis sebutkan diatas, mengenai isu antara hubungan Korea Selatan dan Jepang, rata-rata dari penelitian terdahulu tersebut hanya membahas terkait sejarah hubungan Korea Selatan dan Jepang, serta kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Korea Selatan saja. Karena belum adanya penelitian yang secara spesifik membahas tentang proses pengambilan kebijakan Korea Selatan sebagai respons dari suatu keputusan yang ditetapkan oleh Jepang, khususnya dalam keputusan pembatasan ekspor ini. Penulis akan mencoba untuk menjadikan penelitian ini sebagai pelengkap dari kekurangan-kekurangan tersebut, yang belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait studi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang.

G. Landasan Teori/Konsep/Model

Decision Making Theory

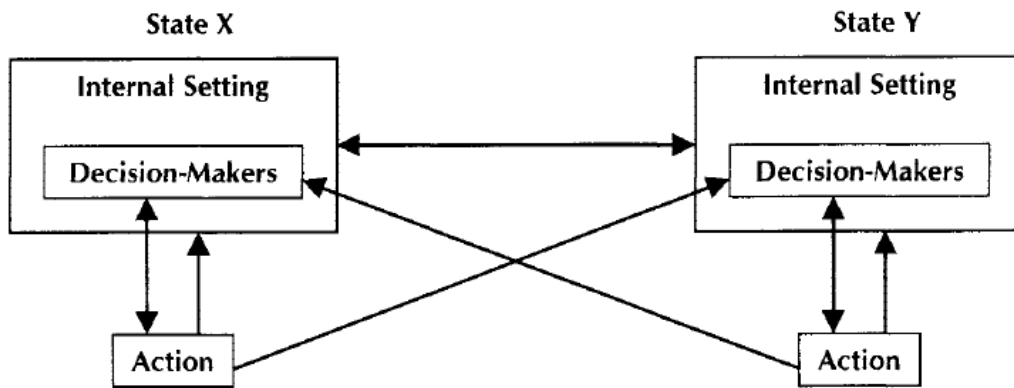
Pada penelitian yang penulis lakukan kali ini, penulis memilih untuk menggunakan *Decision Making Theory* untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang sudah penulis tuliskan diatas. Penulis merasa bahwa penggunaan *Decision Making Theory* dari Richard Snyder, H. W. Bruck, &

Burton Sapin (1962), dapat memberikan jawaban yang baik terkait rumusan masalah dari penelitian ini. *Decision Making Theory* ini sendiri, adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang bagaimana faktor internal dan eksternal dapat menjadi penyebab, diambilnya suatu keputusan ataupun kebijakan oleh orang-orang yang berwenang dalam hal tersebut. Snyder dan yang lainnya dalam menjelaskan teori ini, memiliki tujuan utama yaitu untuk memberi pengertian terhadap suatu fenomena di politik internasional berdasarkan keputusan yang dibuat oleh suatu negara (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002, hal. 202-203).

Setting dalam Decision Making Theory

Dalam teorinya ini, Snyder dan yang lainnya memiliki faktor-faktor yang kemudian mereka sebut sebagai *setting*, yang memiliki peran penting dalam pembuatan sebuah keputusan dan pengaruhnya terhadap tindakan negara. Secara sempit, *setting* dapat diartikan sebagai faktor dan kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Adapun contoh dari *setting* adalah pengaruhnya kepada pertimbangan, persepsi, sikap dan tindakan negara, hingga tujuan dari dibuatnya suatu kebijakan oleh negara. *Setting* ini sendiri, memberikan gambaran bagaimana seorang pembuat kebijakan merespons hingga bertindak sesuai dengan kondisi dan faktor yang mempengaruhi mereka baik dari internal maupun eksternalnya (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002, hal. 59-62). Dalam hal ini adalah negara, maka disini dijelaskan bagaimana satu negara bertindak, dan merespons negara lainnya, serta dengan mempertimbangkan kondisi dari pemerintahan dalam negaranya sendiri. Seperti yang sebelumnya sudah dituliskan diatas, *setting* sendiri terbagi menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal. Kedua *setting* ini merupakan sebuah hubungan aksi-reaksi yang saling berkaitan satu

dengan yang lainnya. Selain setting, Snyder, Bruck & Sapin, juga menggunakan *social structure & behavior* untuk melengkapi analisis dalam teorinya ini



Sumber : (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002, hal. 57)

Setting Internal

Setting internal dapat berupa bagaimana masyarakat berfungsi dan diorganisasikan, seperti opini, sikap publik, politik domestik, posisi geografis hingga kekuatan nasional (Hara, 2011, p. 88). *Setting* internal memiliki peran yang sangat penting dalam bagaimana kebijakan dihasilkan oleh negara. *Setting* internal memiliki peran yang menjadi semakin besar pada saat ini, karena sebagian besar negara di dunia ini telah menganut sistem demokrasi. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi faktor dari terciptanya suatu *Setting* internal dalam sebuah negara, diantaranya adalah *Non-human environment*, *society*, dan *human environment* (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002, hal. 64).

- ***Non-human environment***, dapat diartikan menjadi bagaimana suatu keadaan yang bukan disebabkan oleh manusia dan tidak dibuat oleh manusia itu sendiri, bisa menjadi sebuah *setting* internal, yang kemudian

bisa berdampak kepada kebijakan yang dihasilkan oleh suatu negara. Lebih lanjut dalam tulisannya ini, Snyder dan yang lainnya menjelaskan posisi geografis sebagai sebuah faktor dari *non-human environment* dalam *setting* internal (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002, hal. 60-61). *Non-human environment* kemudian juga dapat dipahami sebagai bagaimana suatu lingkungan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dan tempat tinggal dalam suatu negara, dapat berpengaruh kepada kebijakan yang dihasilkan oleh negara tersebut (Qonita, 2019, hal. 799). *Non-human environment* yang dapat dipahami sebagai lingkungan yang tidak berkaitan dengan manusia ini, dapat dilihat sebagai beberapa aspek dari suatu negara, seperti posisi geografis hingga atau kondisi perekonomian dari suatu negara (Thonthowi, 2019, hal. 10).

Dalam memahami perseteruan antara Korea Selatan dan Jepang ini, kita bisa melihat posisi geografis dan kondisi perekonomian di Korea Selatan sebagai salah satu faktor *non-human environment* yang mempengaruhi *setting* internal kedua negara tersebut. Kedekatan geografis antara kedua negara ini secara tidak langsung memaksa keduanya harus selalu berinteraksi, entah itu interaksi yang baik ataupun buruk, ataupun itu interaksi yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Artinya, interaksi antara Korea Selatan dan Jepang merupakan suatu interaksi yang tidak bisa dihindari. Kemudian pada perang dagang yang dimulai ketika Jepang membuat keputusan untuk membatasi eksportnya, hal ini kemudian secara tidak langsung menimbulkan ancaman bagi perekonomian Korea Selatan. Hal ini kemudian didukung oleh letak geografis yang mengharuskan Korea

Selatan untuk berjuang keras dalam menghadapi keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang, agar Korea Selatan tidak mengalami kerugian lebih banyak.

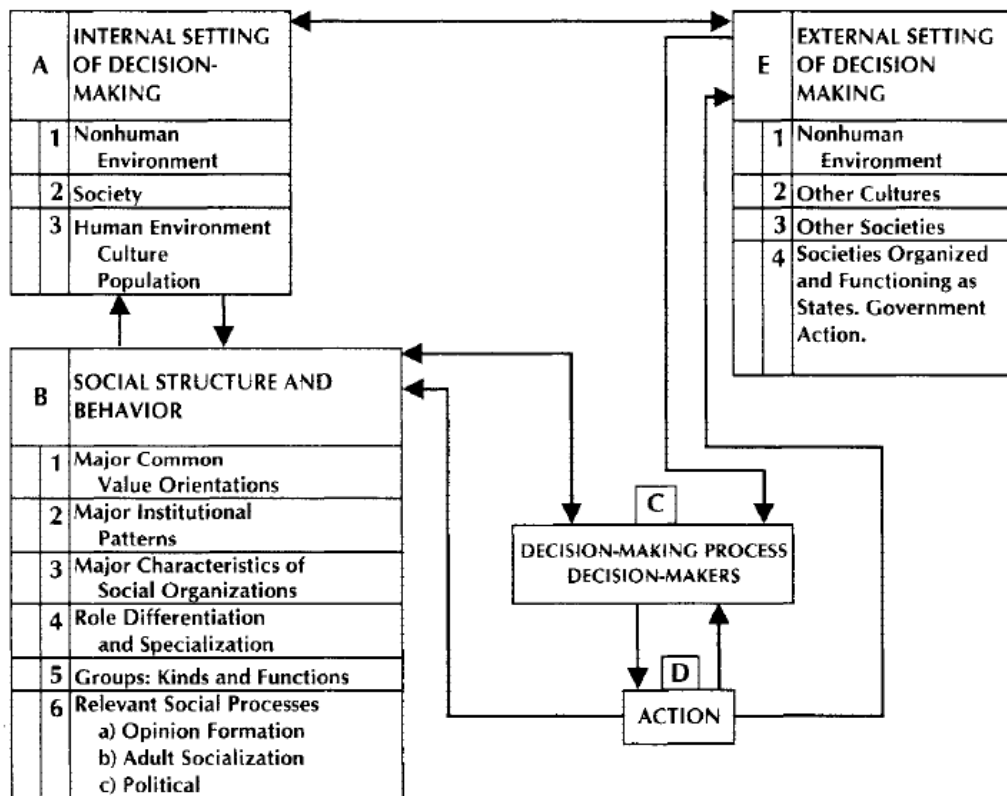
Selain posisi geografis, karena keputusan pembatasan ekspor ini merupakan sebuah keputusan yang menyangkut ekonomi, namun selama hal ini terjadi, Korea Selatan juga mengatakan bahwa keputusan ini bermuatan politik, maka faktor ekonomi dan politik juga dapat digolongkan sebagai faktor dari *non-human environment* yang berpengaruh dalam masalah ini, selain posisi geografis. Hal tersebut terjadi, karena posisi Jepang sebagai pemasok kebutuhan bahan kimia bagi industri *smartphone* di Korea Selatan memiliki posisi geografis yang sangat berdekatan dengan Korea Selatan, yang kemudian secara tidak langsung memaksa Korea Selatan untuk dapat mempertahankan kerjasamanya dengan Jepang, agar negara mereka tidak merugi. Sehingga, jika hal ini tidak bisa diselesaikan, maka pembatasan ekspor oleh Jepang ini akan menimbulkan masalah bagi Korea Selatan. Seperti, meningkatnya modal yang dibutuhkan untuk memproduksi *smartphone* dan terhambatnya proses produksi dari industri *smartphone* itu sendiri.

- **Society** disini dapat diartikan sebagai sebagai, bagaimana masyarakat dapat berpengaruh kepada internal setting dan kemudian keputusan yang dihasilkan oleh suatu negara. Melihat dari apa yang terjadi dalam persetujuan antara Korea Selatan dan Jepang, disini kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari masyarakat kedua negara, yang berupa opini publik. Jika melihat ke belakang, kembali memanasnya hubungan kedua

negara ini, disebabkan oleh kembali diangkatnya isu kerja paksa pada masa Perang Dunia II yang dilakukan oleh Jepang. Hal ini kemudian turut memicu masyarakat di negara yang bersangkutan, untuk kembali mengingat hal buruk yang sempat terjadi di masa lalu. Di Korea Selatan sendiri, hal ini kemudian menyebabkan isu-isu terkait Perang Dunia II yang lainnya kian meningkat, hingga menyebabkan gerakan boikot Jepang di kalangan masyarakat Korea Selatan. Dari opini publik masyarakat Korea Selatan ini, kemudian pengaruhnya tentu saja akan sampai ke tingkat pemerintahan. Dimana, pemerintah Korea Selatan harus membuat keputusan yang biasa membuat publik mereka puas, tetapi juga tidak merugikan negaranya.

- **Human environment**, dapat diartikan menjadi bagaimana keadaan manusia di suatu negara dapat menjadi setting internal yang kemudian berpengaruh kepada kebijakan yang dihasilkan suatu negara. Dimana, jika kita menyebutkan tentang “manusia” akan banyak sekali lingkup yang perlu dibahas. Pembasannya diantara lain meliputi manusia sebagai aktor yang mempengaruhi dan membuat kebijakan, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dapat dibuat oleh sang aktor seperti, faktor budaya dan faktor populasi. Manusia sebagai aktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan, secara luas dapat dilihat sebagai masyarakat dan pihak non-pemerintah yang pengaruhnya secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Manusia sebagai pembuat kebijakan dapat dilihat sebagai pemerintah, yang dalam proses pembuatan kebijakannya juga mempertimbangkan keinginan dari pihak lainnya seperti masyarakat dan pihak non-pemerintah. Disamping itu latar

belakang dari manusia seperti budaya dan populasi, juga dapat menjadi penentu arah kebijakan suatu negara. Contohnya, dari persetujuan antara Korea Selatan dan Jepang ini. Sebagian besar masyarakat Korea Selatan yang ‘terbawa emosi’, seakan memberikan dorongan kepada pemerintahnya untuk membuat kebijakan yang seakan memberikan perlawanan kepada Jepang. Hal ini terjadi tidak terlepas dari hal yang melatar belakangi perilaku masyarakat Korea Selatan itu tadi, yaitu peristiwa di masa lalu.



STATE "X" AS ACTOR IN A SITUATION
 (Situation is comprised of a combination of selectively relevant factors in the external and internal setting as interpreted by the decision-makers.)

Sumber : (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002, hal. 64)

Social Structure and Behavior

Sebelum lebih lanjut membahas tentang setting eksternal, penulis akan sedikit memberikan pembahasan tentang *social structure and behavior* yang juga digunakan untuk melakukan analisis dalam teorinya ini. *Social structure and behavior*, dapat diartikan sebagai, bagaimana struktur dan perilaku sosial dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan oleh suatu negara. Dalam hal ini, struktur dan perilaku sosial tersebut dapat secara langsung mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan para pembuat kebijakan, ataupun bisa mempengaruhi suatu kebijakan secara tidak langsung, melalui suatu setting internal terlebih dahulu. Dalam menggunakan *social structure and behavior*, untuk melakukan analisisnya, Snyder, Bruck, & Sapin, setidaknya menggunakan beberapa faktor yang lebih lanjut digunakan agar analisis yang dihasilkan bisa menjadi lebih spesifik. (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002, hal. 61-64)

Beberapa faktor yang digunakan dalam analisis *social structure and behavior* ini adalah *major common orientation value*, *major institutional pattern*, *major characteristics of social organization*, *role differentiation and specialization*, *groups : kinds and function*, dan *relevant social process*. *Major common orientation value*, dapat diartikan sebagai, bagaimana orientasi nilai bersama yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat dapat berpengaruh kepada pengambilan kebijakan. *Major institutional pattern*, dapat diartikan sebagai, bagaimana pola institusional utama dari sebuah negara, dapat berpengaruh kepada proses pengambilan kebijakan di negara tersebut. *Major characteristics of social organization*, menjelaskan tentang bagaimana karakteristik utama dari sebagian besar organisasi sosial di suatu negara, dapat berpengaruh kepada

kebijakan yang akan dikeluarkan oleh negara tersebut. *Role differentiation and specialization*, dapat diartikan sebagai, bagaimana perbedaan dan spesialisasi peran dalam suatu negara, dapat berpengaruh kepada kebijakan yang akan dihasilkan oleh negara tersebut. *Groups : kinds and function*, dapat diartikan sebagai, bagaimana kelompok yang bermacam-macam dan memiliki fungsinya yang masing-masing berbeda, dapat berpengaruh kepada suatu negara. *Relevant social process*, adalah bagaimana proses sosial yang relevan (seperti pembentukan opini, sosialisasi, dan politik) dapat berpengaruh kepada kebijakan yang akan dihasilkan oleh suatu negara.

Dari beberapa faktor yang digunakan dalam analisis *social structure and behavior* diatas, penulis hanya akan memilih beberapa dari faktor tersebut untuk digunakan dalam menganalisis penelitian penulis ini. Beberapa faktor yang penulis pilih diantaranya adalah *major common value orientation, major institutional pattern, role differentiation and specialization*, dan *relevant social process*. Alasan dari penulis untuk hanya memilih 4 dari 6 faktor yang digunakan Snyder, Bruck, & Sapin, dalam analisisnya tersebut, adalah karena 4 faktor ini memiliki relevansi dan ketersediaan data yang sangat mendukung untuk penulis melakukan analisis dalam penelitian penulis ini yang terkait membahas tentang perseteruan antara Korea Selatan dan Jepang ini.

Setting Eksternal

Setting eksternal dapat berupa aksi dan reaksi dari negara lain, yang merupakan suatu kondisi yang berada di luar wilayah suatu negara tersebut (Hara, 2011, p. 88). Dalam hubungan internasional, tentu saja *setting* eksternal

memainkan peran yang sama pentingnya dengan setting internal. Hal ini sejalan dengan bentuk dari *setting* eksternal yang berupa reaksi yang ditimbulkan dari satu negara dalam merespons tindakan negara atau keputusan dari negara lainnya. Pada masa sekarang ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara sebagai aksi, dapat menimbulkan keluarnya kebijakan baru di negara lain sebagai bentuk reaksi. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi faktor dari terciptanya suatu *setting* eksternal dalam sebuah negara, diantaranya adalah *Non-human environment, Other cultures, Other societies, dan Societies Organized and Functioning as States and Government Action* (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002, hal. 64).

- ***Non-human environment***, dapat diartikan sebagai bagaimana, suatu keadaan yang tidak berasal dari manusia dan bukan buatan manusia dapat menjadi eksternal *setting* yang dapat berpengaruh kepada pengambilan kebijakan suatu negara, yang secara lebih lanjut ditulis Snyder dalam tulisannya ini adalah sebagai posisi geografis (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002, hal. 60-61). *Non-human environment*, kemudian juga dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang berasal dari luar suatu negara dan merupakan lingkungan infrastruktur dari negara lain yang kemudian dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada kebijakan negara lainnya (Qonita, 2019, hal. 801). Kemudian, *non-human environment* yang merupakan suatu faktor yang berasal dari lingkungan non manusia ini, juga dapat dipahami sebagai posisi geografis dan juga kondisi ekonomi suatu negara, atau dalam hal ini adalah yang berasal dari negara lainnya, yaitu Jepang ke Korea Selatan (Thonthowi, 2019, hal. 12).

Dalam persetujuan antara Korea Selatan dengan Jepang, posisi geografis tentu saja menjadi salah satu penentunya. Dikarenakan respon Korea Selatan yang berjuang agar dapat mempertahankan kerjasamanya dengan Jepang, juga dikarenakan posisi kedua negara ini yang dekat secara geografis. Keputusan Jepang untuk membatasi ekspornya ini dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan di bidang ekonomi. Namun, Korea Selatan memahami hal ini dengan cara yang berbeda, dimana mereka menganggap bahwa pembatasan ekspor ini adalah keputusan yang bermuatan politik, yang ditujukan sebagai balasan atas keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018. Jadi dapat dikatakan, selain posisi geografis, faktor ekonomi dan politik juga dapat dikatakan sebagai faktor *non-human environment* yang juga memiliki peran yang signifikan dalam persetujuan antara Korea Selatan dan Jepang ini.

- ***Other cultures***, dapat diartikan sebagai, bagaimana budaya dari luar atau negara lain dapat menjadi setting eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Dalam kasus ini, Jepang yang tidak terima karena Korea Selatan kembali mengungkit masalah pekerja paksa pada masa Perang Dunia II, menyatakan ketidakpuasan mereka akan hal ini. Hasilnya adalah Jepang kemudian membuat kebijakan untuk memperketat ekspor beberapa jenis bahan kimia mereka ke Korea Selatan.
- ***Other societies***, dapat diartikan sebagai, bagaimana masyarakat dari negara lain dapat menjadi setting eksternal yang dapat berpengaruh kepada kebijakan suatu negara. Dalam kasus ini, masyarakat Korea Selatan yang juga kembali mengungkit masalah pada Perang Dunia II, yang seharusnya

sudah selesai melalui perjanjian Tahun 1965. Kembali dikeluarkannya tuntutan dari masyarakat Korea Selatan kepada Jepang, juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hubungan kedua negara ini kembali memanas, hingga Jepang memutuskan untuk memperketat ekspornya ke Korea Selatan.

- ***Societies Organized and Functioning as States and Government Action***, dapat diartikan sebagai, bagaimana masyarakat diorganisir dan berfungsi sebagai negara, hingga kemudian menyebabkan aksi di tingkat pemerintah, dalam merespons masalah atau isu yang beredar dari luar negaranya. Dalam kasus ini, kita bisa melihat bagaimana keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang, menghasilkan gejolak di masyarakat Korea Selatan dan kemudian menghasilkan suatu kebijakan dari Korea Selatan, untuk merespons aksi dari Jepang ini.

Dalam bahasa yang lebih ringkas, setting internal dari suatu negara, ketika diterima atau masuk ke negara lainnya, dapat ditafsirkan sebagai sebuah *setting* eksternal yang kemudian dapat mempengaruhi kebijakan negara tersebut. Dalam hubungan internasional saat ini, secara gamblang memang *setting* eksternal terlihat lebih mendominasi kebijakan suatu negara, dibandingkan dengan *setting* internal. Namun, perlu diketahui *setting* internal juga memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Dengan kata lain, kedua konsep *setting* ini juga memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan.

Jika konsep *setting* diterapkan dalam analisa perseteruan antara Korea Selatan dan Jepang ini, kita dapat melihat hubungan aksi dan reaksi yang terjadi antara kedua negara tersebut. Dimulainya kebijakan pembatasan ekspor oleh

Jepang kepada Korea Selatan, dapat dilihat sebagai *setting* internal dari Jepang, yang kemudian diterima Korea Selatan sebagai *setting* eksternal. Dikatakan demikian, karena Korea Selatan kemudian membuat kebijakan untuk membalas kebijakan Jepang tersebut, yaitu dengan memberikan tuduhan balik kepada Jepang, menghapus Jepang dari 'white list' mereka dan juga memutuskan untuk membawa masalah ini ke WTO. Dari sini, dapat dilihat hubungan bagaimana *setting* mempengaruhi hubungan antar negara, dari kebijakan yang awalnya ditujukan untuk kepentingan nasional, yang kemudian menjadi pemicu lahirnya kebijakan baru di negara lainnya.

Lebih lanjut dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep *setting* dalam *Decision Making Theory*, untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana proses pengambilan kebijakan di Korea Selatan dalam merespons pembatasan ekspor yang telah diputuskan oleh Jepang. Dalam *Decision Making Theory*, konsep *setting* terdiri dari *setting* internal dan *setting* eksternal yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu keputusan, hingga tindakan dari negara. Selain *setting*, ada juga *social structure & behavior* yang menjelaskan bagaimana struktur dan perilaku sosial dapat berpengaruh kepada kebijakan suatu negara. Penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis bagaimana *setting* beserta *social structure & behavior* dapat berpengaruh kepada respons dari Korea Selatan atas kebijakan Jepang tersebut. Jadi, dalam penelitian ini setiap respons yang dikeluarkan Korea Selatan dalam menanggapi pembatasan ekspor oleh Jepang, akan penulis coba analisis menggunakan konsep tersebut. Dimana, dari analisis menggunakan konsep dari Snyder ini, akan memberikan informasi bagaimana konsep tersebut memberikan

pengaruhnya kepada respons dari Korea Selatan itu tadi. Dari analisis menggunakan konsep ini, kemudian penelitian ini akan memberikan hasil akhir berupa informasi terkait bagaimana proses pengambilan kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan sebagai respons dari keputusan pembatasan ekspor Jepang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pilih untuk membahas rumusan masalah pada penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif. Penulis sendiri memilih untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah karena menurut penulis jenis penelitian ini, adalah yang paling relevan untuk membantu menjawab rumusan masalah penelitian ini terkait respons Korea Selatan terhadap keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang. Alasan lain digunakannya jenis penelitian kualitatif, adalah karena dalam menjawab rumusan masalah tersebut, penulis tidak melakukan penelitian secara langsung seperti melakukan survey ataupun kuisioner, melainkan hanya mendapatkan data dari sumber yang telah tersedia, maka penelitian jenis kualitatif ini sangat cocok digunakan dalam penelitian penulis ini. Adapun definisi dari penelitian kualitatif, adalah penelitian yang tujuan utamanya untuk menganalisis serta mendeskripsikan suatu pemikiran, fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, hingga pemikiran secara individu maupun kelompok (Hamdi & Baharuddin, 2014, hal. 9). Dimana, hal-hal tersebut dianalisis untuk mendapatkan penjelasan dan kesimpulannya. Dalam

menggunakan penelitian jenis kualitatif ini, penulis dapat menggunakan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, hingga *website* yang kredibel, untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan sebagai sumber referensi dari penelitian penulis ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian penulis ini adalah Korea Selatan, sebagai pihak yang terkena dampak dari keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang. Sedangkan objek dari penelitian penulis ini adalah strategi dan kebijakan yang akan dipilih Korea Selatan sebagai respons dari keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang tersebut

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis akan menggunakan data sekunder sebagai sumber referensi dari penelitian penulis ini. Data sekunder ini sendiri adalah data yang akan penulis dapatkan melalui penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Untuk mendapatkan data sekunder sebagai sumber referensi itu tadi, penulis dapat membaca, mencatat, serta mengakses data yang penulis butuhkan dari sumber literatur yang tersedia di perpustakaan maupun secara *online*. Adapun beberapa sumber literatur *online* yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya Library UII, Google Scholars, JSTOR, ScinceDirect, Proquest, WestLaw, Libgen, hingga *website* yang kredibel seperti The Conversation, Foreign Affair, dan *website* lainnya yang kredibel serta relevan dengan penelitian penulis ini.

4. Proses Penelitian

Proses pengumpulan data dari penelitian ini penulis awali dengan memilih topik yang relevan dengan program studi Hubungan Internasional serta diminati oleh penulis sendiri. Setelah penulis mendapatkan beberapa calon topik yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, barulah penulis melakukan pencarian informasi lebih lanjut terkait apakah penelitian ini sudah pernah atau sama sekali belum pernah dibahas sebelumnya. Setelah itu, penulis mulai mengumpulkan data-data yang sekiranya penulis butuhkan dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya, barulah penulis memilih sebuah topik yang akan dibahas, membuat latar belakang, kemudian rumusan masalah dari penelitian ini. Proses selanjutnya, adalah penulis mencari lagi sumber data tambahan yang sekiranya dapat bermanfaat dalam kelanjutan penelitian ini, dan memperkuat argumen-argumen yang akan penulis sampaikan dalam penelitian ini, serta membantu penulis dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.

الجمهورية الإسلامية البليزية

BAB II

ANALISIS RESPONS KOREA SELATAN MENGGUNAKAN SETTING INTERNAL DAN *SOCIAL STRUCTURE & BEHAVIOR*

A. *Non-human environment*

Salah satu faktor dalam setting yang dapat mempengaruhi terciptanya kebijakan suatu negara adalah *Non-human environment*. Dimana, faktor ini dapat diartikan sebagai faktor yang bukan berasal dari manusia, tetapi pengaruhnya yang ditimbulkan dalam proses pengambilan kebijakan adalah sangat nyata. Melihat peran dari faktor *Non-human environment* dalam sengeketa yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang, dan juga rentetan respons Korea Selatan untuk menanggapi keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang. Penulis dapat melihat adanya peran dari faktor *Non-human environment* dalam rentetan respons Korea Selatan yang dimulai dari pembantahan atas tuduhan Jepang, menghapus Jepang dari 'white list' mitra dagang mereka, hingga Korea Selatan yang memilih berjuang agar pembatasan ekspor oleh Jepang tersebut dapat dibatalkan, melalui pembahasan lebih lanjut di WTO. Faktor *Non-human environment* yang perannya jelas terlihat sehingga Korea Selatan mengeluarkan respons demikian, diantaranya adalah dominasi Jepang sebagai pihak yang sudah memenuhi kebutuhan bahan dasar industri *smartphone* Korea Selatan sejak lama, kedekatan Korea Selatan dengan Jepang secara geografis, dan juga pertumbuhan pesat dari industri *smartphone* Korea Selatan itu sendiri.

Faktor *Non-human environment* pertama, yang dapat mempengaruhi respons Korea Selatan dalam menyikapi keputusan Jepang tersebut, adalah

dominasi Jepang sebagai pemasok kebutuhan industri *smartphone* Korea Selatan. Rentetan respons Korea Selatan yang dimulai dari awal pengumuman pembatasan ekspor Jepang, hingga membawa masalah ini ke WTO (*World Trade Organization*) dapat dikatakan, sangat dipengaruhi oleh dominasi Jepang sebagai pihak pemenuh kebutuhan industri Korea Selatan tersebut. Karena dominasi Jepang yang sudah berlangsung sejak lama tersebut, Korea Selatan dapat dikatakan sudah masuk dalam keadaan dependensi kepada Jepang sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan bahan baku industri *smartphone* mereka tersebut. Jepang dikatakan telah mendominasi, karena Jepang sendiri diketahui telah memenuhi sekitar 70% dari *hydrogen fluoride*, serta 90% dari *fluorinated polyimides* dan *photoresists* yang merupakan bahan-bahan kimia yang menjadi bahan baku untuk kebutuhan industri *smartphone* Korea Selatan, pada saat ini (Handley, 2019).

Karena dominasi Jepang yang telah berlangsung sejak lama ini, Korea Selatan bahkan belum mempunyai kemampuan yang memadai untuk memproduksi bahan kimia yang mereka butuhkan tersebut sendirian. Ada beberapa hambatan yang membuat Korea Selatan belum mampu melakukan hal tersebut. *Pertama*, Korea Selatan masih kekurangan tenaga ahli yang dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan Jepang, karena minimnya pengetahuan sains yang mendasar. *Kedua*, selain kekurangan tenaga ahli, Korea Selatan juga belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menghasilkan produk yang kualitasnya dapat bersaing dengan yang dihasilkan Jepang, karena Korea Selatan lebih fokus mengejar ketertinggalan dalam banyak bidang teknologi, dibandingkan mempelajari teknologi yang asli atau mendasar.

Ketiga, Korea Selatan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, jika mereka ingin memproduksi bahan kimia tersebut sendiri, dikarenakan sebelumnya Korea Selatan sudah terlalu bergantung dengan Jepang dalam waktu yang lama, dan mereka belum pernah melakukan produksi secara mandiri (Shin, 2019). Maka dari itu, dominasi Jepang yang sudah sejak lama menjadi pemenuh kebutuhan industri *smartphone* di Korea Selatan ini, juga menjadi faktor *Non-human environment* yang mempengaruhi rentetan respons dari Korea Selatan yang pada akhirnya memilih untuk melakukan negosiasi dengan Jepang terkait masalah ini. Dimana, hal ini tentu saja memiliki resiko yang lebih kecil untuk merugikan Korea Selatan, jika dibandingkan dengan ketika mereka memberikan respons langsung dengan bentuk yang lebih agresif seperti pernyataan mereka untuk siap melakukan produksi mandiri, terhadap bahan baku *smartphone* yang dibatasi ekspornya oleh Jepang tersebut.

Letak geografis, juga menjadi faktor *Non-human environment* lainnya yang membuat Korea Selatan memilih untuk merespons dengan melakukan negosiasi agar keputusan Jepang tersebut dapat dibatalkan. Sebagai faktor *Non-human environment* yang tentu saja bukan dibuat oleh manusia, letak geografis antara Korea Selatan dan Jepang ini, secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan Korea Selatan merespons kebijakan Jepang seperti itu. Secara geografis, Jepang dapat dikatakan sebagai salah satu negara tetangga terdekatnya Korea Selatan. Dimana, wilayah timur dari Korea Selatan secara langsung berbatasan dengan Jepang, serta daratan kedua negara di wilayah tersebut hanya dipisahkan oleh lautan yang membentang luas sepanjang sekitar 942 km. Dikarenakan letaknya yang sangat dekat ini, tentu saja Jepang menjadi

salah tujuan terbaik bagi Korea Selatan, sebagai negara yang dapat diajak bekerjasama. Walaupun keduanya sempat memiliki kenangan buruk di masa lalu, tetapi tetap saja Jepang bukanlah pihak yang harus Korea Selatan hindari di masa sekarang, jika Korea Selatan tidak ingin merugi.

Dalam persetujuan yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang ini, letak geografis tentu saja memiliki peran dalam dikeluarkannya respons Korea Selatan yang memilih untuk berjuang agar Jepang bisa membatalkan pembatasan eksportnya ini. Jika dilihat dari pengaruh letak geografis kepada terciptanya sebuah kebijakan, maka upaya Korea Selatan yang mengupayakan agar pembatasan ekspor Jepang tersebut bisa dibatalkan, dapat terjadi karena adanya pertimbangan terhadap jarak antara Korea Selatan dan Jepang. Dimana, letak geografis yang membuat kedua negara ini berdekatan, tentu saja berpengaruh kepada biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman barang kimia yang dibutuhkan sebagai bahan baku dalam industri *smartphone* di Korea Selatan.

Rentetan respons Korea Selatan dari yang awalnya membantah tuduhan Jepang, hingga lebih memilih untuk mengupayakan agar Jepang membatalkan keputusannya tersebut, tentu saja muncul karena adanya beberapa pertimbangan dalam internal Korea Selatan. Pertimbangan yang muncul dikarenakan letak geografis kedua negara ini, merupakan sebuah pertimbangan yang serius. Bahkan, pada saat dialog secara bilateral tidak membuahkan hasil. Korea Selatan dengan cepat langsung membawa masalah ini ke tingkat WTO (World Trade Organization). Korea Selatan sebenarnya juga memiliki pilihan untuk tidak lagi bekerjasama dengan Jepang, apabila negosiasi penyelesaian masalah ini tidak

berhasil. Tetapi, untuk saat ini Jepang merupakan pilihan terbaik Korea Selatan, dalam hal pemenuhan kebutuhan industri *Smartphone* ini.

Selain dominasi Jepang di Korea Selatan dan juga letak Korea Selatan dengan Jepang yang dekat secara geografis. Ada juga faktor *non-human environment* lain yang juga dapat dikatakan berpengaruh kepada respons yang dikeluarkan Korea Selatan dalam merespons pembatasan ekspor Jepang ini. Dimana, respons yang dikeluarkan Korea Selatan disini cenderung lebih berusaha agar hal ini bisa dibatalkan. Faktor lain dari *non-human environment* tersebut tidak lain adalah pertumbuhan pesat dari industri *smartphone* Korea Selatan itu sendiri. Industri *smartphone* Korea Selatan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Bahkan, dapat dikatakan juga bahwa industri *smartphone* Korea Selatan saat ini sedang berada masa-masa kejayaannya.

Dikatakan bahwa industri *smartphone* di Korea Selatan sedang dalam masa kejayaannya, dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh salah satu produsen *smartphone* terbesar di Korea Selatan yaitu Samsung Electronics. Samsung sendiri diketahui mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Dimana, pendapatan Samsung di tahun 2015 hanya sebesar US\$ 178 miliar, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar US\$ 222 miliar pada tahun 2018 (Trefis, 2020). Samsung juga dapat dikatakan menjadi salah satu merk dari *smartphone* yang paling diminati secara global, dilihat dari jumlah total pengiriman produk secara global sepanjang tahun 2018, yang pada saat itu ada

sekitar 293.7 juta unit dari produk *smartphone* Samsung yang telah dikirimkan ke seluruh dunia (Canalys, 2019).

Industri *smartphone* Korea Selatan yang sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat ini, secara langsung juga menjadi sebuah faktor *non-human environment* turut di pertimbangkan oleh Korea Selatan dalam merespons keputusan pembatasan ekspor Jepang ini. Dimana, karena adanya pertimbangan akan hal ini juga, maka Korea Selatan kemudian merespons keputusan Jepang tersebut dengan upaya yang seakan berusaha agar hal ini bisa dibatalkan, dan mereka bisa menerima ekspor dari Jepang seperti semula. Pemerintah Korea Selatan tentu saja tidak ingin produksi dari industri *smartphone* mereka mengalami hambatan, yang mana hal ini jika dibiarkan berlangsung, akan berpengaruh kepada kerugian ekonomi yang akan diderita oleh Korea Selatan itu sendiri. Dikarenakan mereka tidak ingin hal tersebut terjadi, maka pemerintah Korea Selatan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, yang dimulai dari respons mereka yang memberikan klarifikasi terhadap tuduhan Jepang, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk membawa masalah ini agar bisa diselesaikan di WTO.

Jepang dianggap sebagai pilihan terbaik Korea Selatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan industri *smartphone* mereka ini, tentu saja dikarenakan kedua negara ini memiliki jarak yang sangat dekat secara geografis. Dimana, letak geografis yang saling berdekatan ini, membuat Korea Selatan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk pengiriman bahan-bahan yang mereka butuhkan dalam pemenuhan kebutuhan industri mereka ini. Selain biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman tidak terlalu besar, dikarenakan letaknya yang

berdekatan, waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman bahan baku *smartphone* yang dibutuhkan Korea Selatan tersebut, juga tidak akan memakan waktu yang lama. Dengan mempertahankan Jepang sebagai produsen dari bahan yang menjadi kebutuhannya, maka Korea Selatan dapat mengurangi biaya dan lebih efisien dalam waktu pengiriman barang yang mereka butuhkan. Hal ini kemudian akan berpengaruh kepada kecepatan produksi dan pertumbuhan dari industri pembuatan *smartphone* di Korea Selatan itu sendiri, yang mana juga sedang mengalami masa pertumbuhan yang sangat pesat hingga dapat dikatakan sedang berada dalam masa kejayaannya pada saat ini. Korea Selatan, tentu saja memiliki pilihan untuk memilih produsen lain, jika negosiasi mereka dengan Jepang ini tidak berhasil. Tetapi, karena adanya keuntungan yang didapat melalui letak dari kedua negara ini yang berdekatan. Korea Selatan lebih memilih untuk merespons keputusan pembatasan ekspor Jepang tersebut dengan cara negosiasi agar keputusan Jepang tersebut bisa dibatalkan. Karena, Korea Selatan sudah terlanjur bergantung kepada Jepang sebagai pihak yang telah memenuhi kebutuhan industri mereka sejak lama, kedekatan geografis yang memberikan keuntungan kepada Korea Selatan, hingga adanya pertimbangan terkait industri *smartphone* mereka, yang mana ditakutkan akan mengalami penurunan ketika negaranya tidak lagi menjalin kerjasama dengan Jepang.

Dominasi Jepang sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan industri *smartphone* Korea Selatan, letak geografis Korea Selatan dan Jepang yang berdekatan, hingga industri *smartphone* Korea Selatan yang sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat ini, kemudian menjadi faktor *non-human environment* yang kemudian menjadi sebuah setting internal bagi Korea Selatan

dalam mengeluarkan kebijakan atau tindakan untuk merespons keputusan pembatasan ekspor yang dikeluarkan oleh Jepang. Dimana, faktor-faktor ini mempengaruhi respons Korea Selatan dari adanya pertimbangan terkait kerugian secara ekonomi yang akan Korea Selatan dapatkan, jika mereka tidak berhasil untuk membatalkan pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh Jepang ini, yang kemudian akan berakibat pada terganggunya produksi dari industri *smartphone* Korea Selatan itu sendiri.

B. Society

Selain Non-human environment, *Society* juga merupakan salah satu faktor dari setting internal yang dapat mempengaruhi kebijakan dari suatu negara. *Society* sendiri, dapat dijelaskan sebagai bagaimana masyarakat dapat berpengaruh sebagai internal setting yang kemudian juga dapat mempengaruhi keputusan yang dihasilkan oleh suatu negara. Dalam persetujuan antara Korea Selatan dan Jepang ini, peran yang dimainkan oleh *society* sangatlah penting. Apalagi jika melihat respons yang dikeluarkan Korea Selatan dalam menghadapi keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang tersebut. Walaupun *society* tidak secara langsung dapat menghasilkan sebuah kebijakan, tetapi tuntutan dari *society* memiliki pengaruh yang cukup besar dalam terciptanya kebijakan suatu negara.

Dalam respons Korea Selatan yang memilih untuk melakukan negosiasi terlebih dahulu, terkait keputusan Jepang yang memilih untuk membatasi eksportnya, kita dapat melihat peran *society* disini. *Society* yang dalam hal ini merupakan masyarakat Korea Selatan, cenderung memiliki reaksi yang beragam terhadap keputusan pembatasan ekspor yang dilakukan Jepang tersebut. Ada yang mendukung Korea Selatan untuk segera melakukan serangan balasan. Tetapi,

tidak sedikit juga yang menginginkan keadaan kedua negara ini segera membaik, dikarenakan kerjasama kedua negara ini yang dinilai sangat krusial. Keputusan Jepang untuk membatasi ekspornya tersebut, secara tidak langsung kembali menimbulkan gejolak dalam hubungan kedua negara tersebut. Hal ini juga berpengaruh kepada keadaan politik dalam negeri Korea Selatan, yang kemudian menjadi terfokus kepada tindakan Jepang tersebut.

Korea Selatan sebagai negara yang menggunakan sistem demokrasi, tentu saja tidak bisa abai dengan tuntutan publiknya terhadap Jepang tersebut. Apalagi dengan adanya konsep “*collaboritive governance*” dan peran masyarakat sipil yang semakin ditingkatkan pada masa pemerintahan Moon Jae In, memungkinkan masyarakat Korea Selatan untuk semakin berpengaruh kepada kebijakan yang akan dihasilkan oleh negaranya. Respons yang diambil Korea Selatan dalam menanggapi keputusan Jepang ini, tidak terlepas dari pengaruh *society* di Korea Selatan itu sendiri. Karena respon dari publik Korea Selatan yang juga cukup beragam, maka kebijakan yang dihasilkan Korea Selatan dalam menanggapi keputusan Jepang tersebut juga beragam.

Pengaruh *society* dalam respons yang dikeluarkan Korea Selatan dalam menanggapi pembatasan ekspor oleh Jepang, diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, Korea Selatan membantah tuduhan Jepang yang mengatakan bahwa Korea Selatan telah menyalahgunakan tiga bahan kimia utama yang saat ini ekspornya dibatasi tersebut, dengan menggunakannya untuk keperluan militer. Korea Selatan membantah dan mengatakan tuduhan Jepang ini tidak memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, Korea Selatan mengatakan bahwa pembatasan ekspor Jepang tersebut justru bermotif politis, sebagai balasan atas

tuntutan yang diberikan MA (Mahkamah Agung) Korea Selatan kepada perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi kepada korban mantan pekerja paksa pada Perang Dunia II (KBS World Radio, 2019). Respons Korea Selatan ini, sangat sesuai dengan respons yang disampaikan oleh masyarakatnya terkait keputusan Jepang tersebut. Masyarakat Korea Selatan juga menilai bahwa pembatasan ekspor Jepang tersebut bermotif politis dan dilakukan sebagai motif balas dendam atas keputusan MA Korea Selatan, setahun sebelumnya.

Kedua, sebagai respons kepada keputusan lanjutan dari Jepang yang menghapus Korea Selatan dari 'white list' mitra dagang mereka, Korea Selatan juga memberlakukan hal yang serupa. Dalam keputusan Korea Selatan yang juga memilih untuk menghapus Jepang dari 'white list' mitra dagang mereka, dapat dilihat dengan jelas bagaimana *society* dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Sebagai negara yang demokratis, Korea Selatan kemudian melibatkan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam keputusan yang akan segera mereka ambil, dalam hal ini penghapusan Jepang dari 'white list' mereka. Masyarakat Korea Selatan, kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan opini publik melalui situs resmi pemerintah dan surat elektronik, terkait penghapusan Jepang dari daftar 'white list' negara mereka. Dimana, hasilnya adalah 91% dari responden memilih setuju, untuk menghapus Jepang dari 'white list' mitra dagang mereka (Xinhua, 2019). Setelahnya, MOTIE (*The Ministry of Trade, Industry and Energy*) Korea Selatan menyatakan bahwa keputusan penghapusan Jepang dari 'white list' mitra dagangnya akan mulai berlaku sejak 18 September 2019.

Ketiga, Korea Selatan juga merespons keputusan pembatasan ekspor tersebut, dengan mengajak Jepang untuk melakukang negosiasi lebih lanjut agar Jepang dapat membatalkan hal tersebut. Korea Selatan juga bahkan telah mengangkat masalah ini untuk diselesaikan di tingkat WTO, karena dalam negosiasi yang dilakukan secara bilateral antara Korea Selatan dan Jepang masih terdapat kebuntuan. Respons Korea Selatan yang lebih mengupayakan upaya negosiasi agar Jepang membatalkan pembatasan ekspornya ini, juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh *society* yang merupakan masyarakat Korea Selatan itu sendiri. Walaupun ada masyarakat Korea Selatan yang sangat mendukung negaranya untuk melakukan serangan balasan kepada Jepang, bahkan sudah timbul gerakan untuk memboikot Jepang di kalangan masyarakat Korea Selatan. Tetapi, ada juga kalangan masyarakat Korea Selatan yang juga mendukung keduanya untuk mencapai kesepakatan secepat mungkin. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran bahwa Korea Selatan dan Jepang merupakan mitra di kawasan yang posisinya sangat krusial (Korea Now, 2019). Korea Selatan yang juga sadar akan hal tersebut, kemudian juga lebih memilih untuk melakukan negosiasi dan mengupayakan agar pembatasan ekspor Jepang tersebut bisa secepatnya dibatalkan. Karena jika tidak, hal ini akan bisa menyebabkan masalah yang lebih serius.

Dari beberapa tindakan yang dilakukan Korea Selatan untuk merespons keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang tersebut, dapat dilihat bahwa opini publik yang dihasilkan oleh *Society*, dapat berpengaruh kepada tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. Dalam persetujuan antara Korea Selatan dan Jepang ini, *society* yang dalam hal ini adalah masyarakat Korea Selatan,

memiliki pengaruhnya dalam respons yang dikeluarkan Korea Selatan untuk menanggapi setiap keputusan Jepang yang ditujukan kepada negaranya. Opini publik dari masyarakat Korea Selatan yang kemudian menjadi tuntutan, secara tidak langsung dapat memberikan pengaruhnya di tingkat pembuatan kebijakan. Karena, Korea Selatan sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi, harus dapat mengakomodir keinginan dari rakyatnya yang dalam bentuk opini publik tersebut. Secara tidak langsung, demokrasi yang dianut oleh Korea Selatan membuat pengaruh *society* sebagai setting internal yang dapat mempengaruhi kebijakan menjadi semakin kuat, sehingga opini publik masyarakat Korea Selatan semakin didengar di tingkat pembuat kebijakan, yang kemudian berpengaruh kepada kebijakan yang akan dihasilkan tersebut.

C. ***Human Environment***

Human environment, adalah faktor terakhir dari *setting* internal yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh suatu negara. *Human environment* sendiri, dapat diartikan menjadi bagaimana keadaan manusia di suatu negara dianggap sebagai sebuah setting internal, yang kemudian dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh negara tersebut. *Human environment* sebagai internal setting ini, kemudian melihat manusia sebagai pihak yang hanya bisa mempengaruhi kebijakan dan juga pihak yang mempunyai kewenangan itu membuat kebijakan. Dalam kasus ini, manusia sebagai pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah publik Korea Selatan, ataupun pihak lain di Korea Selatan selain pemerintahnya. Sedangkan, manusia sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan adalah pemerintah dari Korea Selatan itu sendiri.

Berbeda dengan *society* yang secara langsung membahas bagaimana perannya yang berupa opini publik dapat berpengaruh kepada kebijakan suatu negara. *Human environment* lebih menekankan kepada bagaimana faktor budaya dan populasi dapat mempengaruhi keadaan manusia di suatu negara. Dalam hal ini, bagaimana faktor tersebut mempengaruhi publik atau pihak non-pemerintah di Korea Selatan, memberikan reaksi atau respons yang demikian, atas tindakan yang dilakukan Jepang ke negaranya. Serta bagaimana faktor budaya dan populasi tadi, dapat berpengaruh kepada proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan itu sendiri. Dengan begitu, *human environment* dapat menjelaskan bagaimana dan sebesar apa pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor budaya dan populasi kepada kebijakan yang menjadi respons Korea Selatan untuk menghadapi keputusan Jepang tersebut.

Dalam persetujuan antara Korea Selatan dan Jepang ini, *human environment* yang menjelaskan manusia sebagai pihak yang dapat mempengaruhi sebuah keputusan, dapat dilihat dari keadaan di Korea Selatan pada saat Jepang mengumumkan akan membatasi eksportnya ke Korea Selatan. Sebagian besar respons yang dikeluarkan oleh publik Korea Selatan, menyatakan reaksi tidak senang mereka atas tindakan Jepang ini. Bahkan, tidak lama setelah Jepang menyampaikan pengumuman tersebut, mulai timbul gerakan anti-Jepang di Korea Selatan dengan tagar “*#BoycottJapan*” yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun juga didukung oleh banyak *influencer* di Korea Selatan. Salah satu *influencer* Korea Selatan yang dengan jelas menunjukkan sentimennya kepada Jepang ini adalah pemilik kanal *youtube* “*clark tv*” yaitu Hong Song Hyuk, yang dalam vidionya dia dengan sengaja

merobek tiket perjalanan ke Jepang seharga KR₩ 1,35 juta (Ruide, 2019). Tindakan yang dilakukan Hong ini, dapat dikatakan telah mencerminkan kemarahan sebagian besar publik Korea Selatan atas apa yang keputusan Jepang yang menysar Korea Selatan tersebut.

Dalam *human environment*, keadaan di publik Korea Selatan yang cenderung tersulut emosinya tersebut, dapat dipahami lebih jauh lagi, dengan menggunakan faktor budaya dan populasi. Publik Korea Selatan yang masih belum bisa memaafkan Jepang sepenuhnya atas hal buruk yang terjadi semasa pendudukan mereka di Korea Selatan, cenderung menjadi sangat sensitif ketika ada gejolak yang terjadi dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Dalam kasus ini, keputusan Jepang untuk melakukan pembatasan ekspor, tentu saja menjadi ancaman yang dapat merugikan Korea Selatan. Publik Korea Selatan yang merasa sudah banyak dirugikan Jepang, cenderung tidak menerima hal ini, dan menginginkan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang juga dapat merugikan Jepang. Hubungan buruk yang terjadi di masa lalu ini, hingga kini masih menjadi salah satu sentimen yang “mendarah daging” di populasi Korea Selatan. Pengaruhnya tentu saja telah sampai di tingkat pembuatan Kebijakan. Dimana, Korea Selatan mulai merespons tindakan Jepang tersebut, yang dimulai dengan pembantahan terkait penyalahgunaan untuk kegiatan militer, hingga Korea Selatan terus berusaha melawan Jepang dengan kesiapan mereka membawa masalah ini ke tingkat WTO.

Tidak hanya sebagai pihak yang mempengaruhi kebijakan suatu negara, *human environment* juga menjelaskan tentang bagaimana manusia sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini

pemerintah Korea Selatan. Keadaan manusia sebagai pihak yang berwenang untuk membuat kebijakan, juga dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan faktor populasi. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah Korea Selatan tentu saja memiliki tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan dengan pihak lainnya yang hanya bisa mempengaruhi kebijakan tersebut. Karenanya, walaupun dapat dipengaruhi oleh pihak lain, pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan harus dapat berpikir secara rasional yang artinya, harus ada pertimbangan yang lebih lanjut ketika mereka ingin membuat kebijakan yang didasarkan oleh pengaruh dari pihak non-pemerintah di negaranya.

Respons Korea Selatan yang memberikan perlawanan kepada Jepang tentu saja mendapat pengaruh dari faktor populasi. Pengaruh dari tuntutan publik Korea Selatan yang menginginkan negaranya melakukan serangan balasan kepada Jepang, tentu saja sampai di tingkat pemerintah. Hasilnya dapat dilihat dari keputusan Korea Selatan yang juga menghapus Jepang dari 'white list' mitra dagang terbaiknya. Namun, pemerintah Korea Selatan merupakan aktor yang rasional. Karena, jika hanya mengikuti 'emosi' dari populasinya kepada Jepang, Korea Selatan justru akan merasakan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk itu, pemerintah Korea Selatan juga merespons keputusan Jepang ini dengan cara melakukan negosiasi agar hal tersebut bisa dibatalkan.

Respons pemerintah Korea Selatan kepada Jepang, sebagai pihak berwenang untuk membuat kebijakan ini, juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Dalam kasus ini, sejarah buruk antara Korea Selatan dengan Jepang menjadikan kedua negara ini mempunyai hubungan yang dapat dikatakan dinamis. Dimana, akan timbul gejolak dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan, apabila

peristiwa masa lalu keduanya kembali dibahas. Pembatasan ekspor Jepang ini menjadi salah satunya, dimana Korea Selatan menganggap hal ini merupakan upaya balas dendam Jepang atas keputusan MA Korea Selatan yang ditujukan kepada beberapa perusahaan Jepang. Gejolak yang sering terjadi dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang ini, kemudian menjadikan kedua negara ini menjadi tidak ingin kalah antara satu dengan yang lainnya. Respons Korea Selatan dalam menghadapi keputusan pembatasan ekspor Jepang ini, menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak akan tunduk dengan keputusan Jepang yang dapat merugikan negaranya tersebut.

Respons Korea Selatan terhadap keputusan pembatasan ekspor Jepang, dapat dipahami melalui *human environment*. Dimana, keadaan manusia sebagai pihak yang mempengaruhi dan membuat kebijakan, tidak terlepas dari faktor budaya dan faktor populasi yang kemudian menjadi setting internal yang dapat mempengaruhi tindakan suatu negara. Begitu juga dengan respons yang dikeluarkan Korea Selatan.. Korea Selatan tidak sedikitpun menunjukkan keinginan untuk tunduk kepada keputusan Jepang yang dapat merugikan negaranya tersebut. Setting internal yang mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan Korea Selatan, menjadikan negara ini memiliki arah kebijakan yang menentang tindakan Jepang tersebut, tetapi tetap dilakukan dengan pendekatan yang lembut.

D. Social Structure and Behavior

Selain *setting*, *social structure and behavior* merupakan konsep lain yang digunakan Snyder, Bruck, & Sapin dalam analisis *Decision Making Theory* versi mereka. Dimana, *social structure and behavior* ini dapat diartikan sebagai,

bagaimana struktur dan perilaku sosial dapat berpengaruh kepada proses pembuatan kebijakan, hingga kebijakan yang dihasilkan oleh suatu negara. Dalam menggunakan *social structure and behavior*, untuk melakukan analisis pada penelitian ini, penulis memilih untuk hanya menggunakan 4 dari 6 faktor yang dapat digunakan untuk melakukan analisis menggunakan *social structure and behavior*. Alasan penulis untuk hanya memilih 4 dari 6 faktor tersebut, adalah karena adanya relevansi dari ke4 faktor tersebut, dengan analisis dari penelitian yang sedang penulis lakukan ini. Adapun 4 faktor yang penulis pilih untuk digunakan analisisnya dalam menjawab penelitian ini adalah, *major common value orientation, major institutional pattern, role differentiation & specialization*, dan *relevant social process*.

Pertama, *major common value orientation*. Faktor pertama dari *social structure and behavior* yang akan penulis gunakan dalam melakukan analisis terkait ketegangan yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang ini, menjelaskan bagaimana orientasi nilai bersama yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat dapat berpengaruh kepada pengambilan kebijakan. Dalam masalah antara Korea Selatan ini, sebenarnya ada satu nilai bersama yang telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Korea Selatan, yaitu pembelaan atau rasa cinta mereka kepada negaranya, yang kemudian menghasilkan suatu nilai yang dianut secara bersama lainnya, yaitu sentimen mereka terhadap Jepang. Jepang diketahui memiliki sejarah kelam di Korea Selatan, terkait tindakan yang mereka lakukan sepanjang masa kependudukan mereka di Semenanjung Korea, pada Perang Dunia II. Hal ini kemudian menghasilkan pandangan buruk diantara masyarakat Korea Selatan kepada Jepang itu sendiri, dimana hal ini kemudian

secara tidak langsung menjadi sebuah nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Korea Selatan. Hal ini kemudian dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh Yonhap News Agency, yang hasilnya menyatakan bahwa lebih dari 70% masyarakat Korea Selatan pernah ikut serta untuk berpartisipasi dalam aksi boikot produk Jepang, yang mana 69,3% dari responden juga menyatakan bahwa boikot ini harus terus dilanjutkan (Yonhap News Agency, 2020). Dalam perseteruan yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang pasca ditetapkannya pembatasan ekspor oleh Jepang, hal ini tentu saja berpengaruh kepada rentetan respons yang dikeluarkan oleh Korea Selatan sebagai berikut.

Pada respons awal Korea Selatan yang membantah tuduhan Jepang terkait Korea Selatan yang telah salah menggunakan barang yang di ekspor Jepang untuk kebutuhan militer, kemudian Korea Selatan juga memberikan tuduhan lainnya kepada Jepang, yang mengatakan bahwa keputusan Jepang ini diambil sebagai balasan atas keputusan MA Korea Selatan, setahun sebelumnya yang memberikan tuntutan kepada perusahaan Jepang untuk membayar sejumlah ganti rugi. Dalam respons Korea Selatan ini, kita dapat melihat bahwa sentimen anti-Jepang yang timbul di Korea Selatan, telah menjadi sebuah *major common value orientation*, yang mempengaruhi respons yang dikeluarkan oleh Korea Selatan disini. Dimana, ketika Jepang memutuskan untuk membatasi ekspornya ini, dengan segera memunculkan sebuah opini di Korea Selatan yang mengatakan bahwa keputusan Jepang ini dilakukan sebagai pembalasan. Hal ini terjadi tentu saja karena sebelumnya telah ada sentimen anti-Jepang di Korea Selatan itu sendiri. Kemudian, hal ini juga berpengaruh kepada respons yang diberikan Korea Selatan, yaitu mereka dengan beraninya juga memberikan

tuduhan kepada Jepang, disaat yang sama pada saat mereka memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan yang sebelumnya telah disebutkan oleh pihak Jepang.

Selanjutnya, ketika Korea Selatan juga turut menghapus Jepang dari 'white list' mereka, setelah sebelumnya Jepang juga telah melakukan hal yang sama kepada Korea Selatan, dapat dilihat juga bahwa sentimen anti-Jepang di Korea Selatan telah mempengaruhi tindakan Korea Selatan ini, sebagai sebuah *major common value orientation*. Hal ini berdasar kepada, ketika pengambilan keputusan untuk menghapus Jepang dari 'white list' mereka, pemerintah Korea Selatan tidak sendiri untuk memutuskan hal ini. Pemerintah Korea Selatan juga turut melibatkan masyarakatnya melalui pengambilan suara yang dilakukan melalui situs resmi pemerintah dan pengambilan suara dari surat elektronik. Dimana, hasilnya adalah sebagian besar dari masyarakat Korea Selatan yang berpartisipasi dalam pengambilan suara tersebut, menyatakan bahwa mereka setuju untuk menghapus Jepang dari 'white list' mereka. Sentimen anti-Jepang di Korea Selatan, tentu saja berperan dalam hal ini. Perannya yaitu memperkuat keyakinan masyarakat Korea Selatan, untuk melakukan hal yang sama kepada Jepang, karena tindakan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Jepang, dapat memberikan negaranya kerugian. Untuk itu, sebagian besar dari masyarakat Korea Selatan ini, menginginkan negaranya juga melakukan hal serupa kepada Jepang.

Kemudian, pada saat Korea Selatan memutuskan untuk membawa masalah ini ke WTO agar secepatnya bisa diselesaikan disana, sentimen anti-Jepang di Korea Selatan, juga telah berpengaruh sebagai *major common value orientation*

terhadap respons yang telah dipilih oleh Korea Selatan ini. Hal tersebut didasari oleh kesadaran oleh Korea Selatan yang masih belum melihat adanya tindakan dari Jepang yang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya ini. Hal ini kemudian didukung oleh masih adanya pernyataan dari pihak Jepang yang menyatakan bahwa negaranya akan melakukan negosiasi dengan Korea Selatan, untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini kemudian diperkuat lagi oleh tindakan Shinzo Abe yang masih mengirimkan persembahan untuk melakukan ritual di kuil Yasakuni (Kyodo, 2019). Dimana, hal ini kemudian semakin memperkuat sentimen anti-Jepang di Korea Selatan, yang kemudian berakibat kepada timbulnya sebuah pemahaman di Korea Selatan, yang semakin menunjukkan bahwa Jepang akan menyelesaikan masalahnya dengan Korea Selatan ini dalam waktu dekat. Karenanya, Korea Selatan kemudian mencoba untuk membawa masalah ini ke WTO, agar hal tersebut bisa diselesaikan secepatnya, dan menghindari kerugian bagi Korea Selatan itu sendiri.

Kedua, *major institutional pattern*, merupakan faktor kedua dari *social structure & behavior* yang akan penulis ambil, dan gunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. *Major institutional pattern* sendiri, dapat diartikan sebagai, bagaimana pola institusional utama dari sebuah negara, dapat berpengaruh kepada proses pengambilan kebijakan di negara tersebut. Dalam masalah ini, *major institutional pattern* tentu saja berpengaruh kepada tindakan yang diambil oleh Korea Selatan dalam merespons keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang ini. Khususnya di Korea Selatan, yang keputusan akhir dari kebijakan luar negerinya ada di tangan presiden, maka Moon Jae In memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan respons Korea Selatan terkait

keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang ini. Walaupun begitu, tetapi tetap saja kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Korea Selatan disini, tidak sepenuhnya merupakan keputusan dari Moon Jae In seorang diri. Kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Korea Selatan, masih akan diambil melalui adanya pertimbangan dari dalam negaranya, karena seperti yang kita ketahui Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae In ini mengusung konsep *collaborative governance* yang meningkatkan peran masyarakat untuk ikut andil dalam kebijakan negaranya (CHONG WA DAE, 2019). Tetapi tetap saja, Moon Jae In sebagai presiden Korea Selatan, memiliki peran yang sangat dominan disini, khususnya dalam respons-respons yang dikeluarkan oleh Korea Selatan sebagai berikut.

Pasca Jepang menetapkan untuk membatasi eksportnya, Korea Selatan merespons hal ini dengan memberikan klarifikasi yang kemudian membantah tuduhan atas penyalahgunaan bahan kimia untuk kebutuhan kegiatan militer. Disaat yang bersamaan juga, Korea Selatan menyatakan tuduhan balik mereka kepada Jepang yang kemudian mengatakan bahwa keputusan pembatasan ekspor ini diambil Jepang sebagai balasan atas tuntutan MA Korea Selatan kepada beberapa perusahaan Jepang, setahun sebelumnya. Dalam respons Korea Selatan disini, kita dapat melihat bahwa Moon Jae In memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai presiden dari Korea Selatan. Moon Jae In disini dapat dikatakan menjadi wajah utama dari negaranya dalam menjawab pembatasan ekspor Jepang ini, Moon Jae In juga dengan lantang mengatakan bahwa keputusan pembatasan ekspor Jepang ini, merupakan sebuah keputusan yang bermuatan politis, dan ditujukan untuk membalas keputusan MA Korea Selatan

setahun sebelumnya. Dimana, Moon Jae In tentu saja memiliki pilihan untuk tidak menyampaikan hal tersebut, tetapi dia tetap memilih untuk melakukannya, karena keputusan akhir Korea Selatan ada di tangan Moon Jae In itu sendiri.

Pada saat Korea Selatan mengambil tindakan untuk menghapus Jepang dari 'white list' mereka, ketika Jepang sebelumnya telah melakukan hal yang sama kepada negaranya. Peran Moon Jae In, sebagai presiden Korea Selatan tentu saja sangat berpengaruh disini. Pasca Jepang mengatakan untuk menghapus Korea Selatan dari 'white list' mereka, Moon Jae In sebenarnya sempat menyerukan untuk keduanya mengambil jalan damai, melalui sebuah gagasannya yaitu 'Peace Economy' mengingat ancaman dari Korea Utara yang kian nyata juga pada saat itu, karena Korea Utara sedang aktif untuk melakukan tes uji coba atas senjata-senjata terbarunya (Tong-Hyung, 2019). Namun, hal ini tidak berjalan dengan mulus, karena pihak Jepang pada akhirnya tetap menghapus Korea Selatan dari 'white list' mereka. Hal ini kemudian membuat Moon Jae In harus mengambil sikap terhadap keputusan Jepang ini, yaitu pada akhirnya Korea Selatan menetapkan untuk turut menghapus Jepang dari 'white list' mereka, setelah diadakan pengambilan suara yang hasil adalah mayoritas dari responden setuju untuk menghapus Jepang dari 'white list' mereka.

Selanjutnya, ketika Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk membawa masalah ini ke WTO, peran Moon Jae In sebagai presiden Korea Selatan, juga memiliki pengaruh yang besar disini. Dimana, ketika masalah ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama, namun dari Jepang juga belum menunjukkan tanda-tanda bahwa pihaknya akan mencapai sebuah kesepakatan dengan Korea Selatan, maka Moon Jae In sebagai presiden Korea Selatan mulai

mengambil tindakan disini. Hal tersebut dilakukannya karena, jika Korea Selatan membiarkan pembatasan ekspor ini berlangsung dalam waktu yang lebih lama tanpa adanya kepastian terkait bagaimana masalah ini akan diselesaikan, maka Korea Selatan tentu saja akan menjadi pihak yang paling dirugikan disini. Karena, proses produksi dari industri *smartphone* Korea Selatan akan mulai terhambat, yang kemudain juga akan berpengaruh kepada penurunan dari perekonomian di Korea Selatan itu sendiri. Karenanya, Moon Jae In sebagai presiden dari Korea Selatan yang memegang keputusan akhir negaranya, akhirnya memutuskan untuk membawa masalah ini ke WTO, agar secepatnya bisa terselesaikan disana.

Ketiga, *role differentiation & specialization*. Faktor ketiga dari *social structure and behavior* yang akan penulis gunakan untuk melakukan analisis terkait persetujuan antara Korea Selatan dan Jepang ini, menjelaskan bagaimana adanya perbedaan peran dan spesialisasi peran dalam suatu negara, dapat berpengaruh kepada kebijakan yang akan dihasilkan oleh negara tersebut. Dalam persetujuan antara Korea Selatan dan Jepang ini, khususnya dalam respons Korea Selatan untuk menanggapi keputusan pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh Jepang, kita dapat melihat ada beberapa pihak perannya sangat dominan disini, yaitu pemerintah dan masyarakat. Dalam respons Korea Selatan yang membantah tuduhan Jepang terkait penyalahgunaan bahan baku kimia untuk kegiatan militer, peran pemerintah Korea Selatan sangat dominan disini. Karena, pemerintah Korea Selatan memiliki tanggung jawab atas negaranya, termasuk menjawab tuduhan yang mereka anggap tidak benar, dan ditujukan kepada pihaknya. Masyarakat Korea Selatan juga memiliki peran dalam respons yang

pertama ini. Dimana, masyarakat Korea Selatan mendukung klarifikasi yang diberikan oleh pemerintahnya ini, dan kemudian memunculkan sebuah opini publik yang mengatakan bahwa pembatasan ekspor ini adalah bentuk upaya balas dendam Jepang, terhadap tentutan MA Korea Selatan pada tahun 2018.

Jepang yang kemudian memutuskan untuk menghapus Korea Selatan dari *'white list'* mitra dagang terbaiknya, kemudian mendapat respons yang serupa juga dari pihak Korea Selatan. Korea Selatan juga memutuskan untuk menghapus Jepang dari *'white list'* mitra dagang terbaik mereka. Dari respons ini, peran yang dimainkan masyarakat Korea Selatan dapat dikatakan cukup dominan. Dimana, pasca Jepang mengumumkan keputusan mereka untuk membatasi eksportnya ke Korea Selatan tersebut, mengakibatkan kembali meningkatnya sentimen publik Korea Selatan terhadap Jepang. Meningkatnya sentimen publik Korea Selatan terhadap Jepang ini, kemudian diiringi oleh munculnya gerakan *#BoycottJapan* sebagai bentuk pernyataan tidak setuju atas keputusan pembatasan ekspor Jepang tersebut. Dari sentimen yang meningkat ini, secara tidak langsung memberikan tekanan kepada pemerintah Korea Selatan, untuk menimbulkan kesan tidak takut kepada Jepang. Peran dan spesialisasi pemerintah Korea Selatan kemudian ditunjukkan disini, dengan membuat keputusan yang seakan menunjukkan perlawanan dan rasa tidak takut mereka kepada Jepang, yaitu Korea Selatan turut menghapus Jepang dari *'white list'* mitra dagang terbaik mereka.

Selanjutnya, perbedaan dan spesialisasi peran juga kembali ditunjukkan dalam respons Korea Selatan yang memutuskan untuk membawa masalah ini untuk diselesaikan ke WTO. Pemerintah Korea Selatan tentu saja bertanggung

jawab atas segala masalah yang terjadi di negaranya. Karena persetujuan Korea Selatan dengan Jepang yang masih belum menunjukkan titik terang ini, pemerintah Korea Selatan kemudian mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalahnya ini ke WTO, hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran dan spesialisasi pemerintah Korea Selatan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas negaranya, sekaligus sebagai pihak yang dapat menentukan arah kebijakan dari negaranya tersebut. Dalam respons Korea Selatan yang mengangkat masalahnya untuk diselesaikan ke WTO ini, masyarakat Korea Selatan secara tidak langsung memberikan tekanan kepada pemerintahnya untuk secepat mungkin menyelesaikan masalah ini, melalui sentimen Anti-Jepang yang semakin mengalami peningkatan setiap harinya. Dari sentimen yang semakin meningkat ini, secara tidak langsung menyebabkan pemerintah Korea Selatan semakin sadar akan peran mereka, dan kemudian akan lebih berusaha menyelesaikan masalah ini, dan sebisa mungkin membuat negaranya tidak merugi.

Keempat, *relevant social process*. Faktor lainnya dari *social structure & behavior* ini menjelaskan, tentang bagaimana suatu proses sosial yang relevan dapat berpengaruh kepada kebijakan yang dihasilkan oleh suatu negara. Proses sosial yang dimaksud disini adalah *opinion formation, adult socialization* dan *political*. Ketiga proses sosial ini, tentu saja dapat dilihat pengaruhnya dalam berbagai respons Korea Selatan dalam menanggapi keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang dalam penelitian ini. Dalam respons Korea Selatan yang membantah tuduhan Jepang terkait adanya penyalahgunaan bahan kimia untuk kegiatan militer. Disini, selain Korea Selatan membantah tuduhan Jepang tersebut, terjadi juga *opinion formation* dari pihak Korea Selatan, yang

mengatakan bahwa pembatasan ekspor Jepang adalah sebuah tindakan yang dilakukan sebagai balasan dari tuntutan yang dilayangkan MA Korea Selatan. *Adult socialization*, yang berkaitan dengan pemeunuhan ekspektasi juga terjadi disini. Dimana, pemerintah Korea Selatan mencoba untuk memenuhi ekspektasi dari publiknya, bahwa mereka bisa menangani masalah ini, dan tidak akan tunduk dengan tuduhan Jepang tersebut. Selain itu, kita juga bisa melihat *political* sebagai sebuah proses sosial yang mewarnai hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, yang menjadikan hubungan antara kedua negara ini sangat sensitif, apalagi jika menyinggung masalah sejarah.

Dalam respons Korea Selatan yang turut memilih untuk menghapus Jepang dari 'white list' mitra dagang terbaiknya, dapat juga dilihat adanya pengaruh *relevant social process* disini. *opinion formation*, yang terjadi di sebagian besar masyarakat Korea Selatan dan kemudian menghasilkan gerakan Anti-Jepang, kemudian menyebabkan pemerintah Korea Selatan harus memenuhi ekspektasi dari rakyatnya ini, dan kemudian mengambil tindakan serius untuk melawan keputusan Jepang tersebut. Keputusan Korea Selatan yang turut menghapus Jepang dari 'white list' mitra dagang terbaiknya ini, juga dapat dipahami sebagai hasil dari *adult socialization* sebagai sebuah proses sosial. Begitu juga dengan *political*, langkah Korea Selatan ini juga dapat dianggap sebagai sebuah tindakan politis terhadap Jepang yang lebih dahulu telah menghapus Korea Selatan dari 'white list' mitra dagang terbaik mereka.

Pengaruh dari *relevant social process* juga dapat dilihat dalam respons Korea Selatan, yang memilih untuk membawa masalah ini untuk diselesaikan ke WTO. Karena masalah antara Korea Selatan dengan Jepang ini masih, belum

menunjukkan titik terang, terjadilah sebuah *opinion formation* di pihak Korea Selatan, yang merasa bahwa masalah ini akan lebih mudah diselesaikan ketika dibahas di WTO. Tindakan Korea Selatan yang memutuskan untuk mengangkat masalah ini dan diselesaikan ke WTO, juga tidak terlepas dari pengaruhnya *adult socialization*. Dimana, pemerintah Korea Selatan mencoba untuk memenuhi ekspektasi masyarakatnya yang percaya bahwa pemerintah Korea Selatan bisa menyelesaikan masalah ini, dan mereka tidak akan kalah dari Jepang. Tentu saja, tindakan Korea Selatan yang memutuskan untuk membawa masalah ini ke WTO, tidak terlepas dari unsur *political*. Dimana, selain agar masalah ini bisa ditangani lebih baik di tingkat WTO, Korea Selatan juga melakukan hal ini sebagai strategi agar negaranya terhindar dari kerugian secara ekonomi dalam jangka panjang. Dari apa yang penulis tuliskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa , *role differentiation & specialization* serta *relevant social process* merupakan faktor dari *social structure & behavior* yang pengaruhnya juga cukup signifikan dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan Korea Selatan sebagai bentuk respons dari pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh Jepang.

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

BAB III

ANALISIS RESPONS KOREA SELATAN MENGGUNAKAN SETTING EKSTERNAL

A. *Non-human Environment*

Non-human environment, merupakan faktor eksternal setting pertama, yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Dimana, *Non-human environment* sebagai *setting* eksternal dapat diartikan sebagai, bagaimana kebijakan suatu negara, dapat dipengaruhi oleh faktor non-manusia yang berasal dari negara lain atau yang berasal dari luar negara tersebut. Dalam penelitian ini, *Non-human environment* akan dijelaskan sebagai suatu keadaan non-manusia yang berasal dari Jepang, dapat berpengaruh kepada kebijakan yang dihasilkan oleh Korea Selatan, dalam merespons pembatasan ekspor oleh Jepang. Lebih lanjut, penulis melihat ada beberapa kondisi di pihak Jepang yang dapat dianggap sebagai faktor *Non-human environment setting* eksternal dari Jepang yang dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan oleh Korea Selatan. Beberapa kondisi tersebut diantaranya adalah kapabilitas Jepang sebagai produsen bahan kimia yang dibutuhkan Korea Selatan, posisi geografis antara kedua negara yang berdekatan, dan posisi Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Jepang telah menjadi produsen dari bahan kimia yang dibutuhkan dalam industri *smartphone* di Korea Selatan sejak lama. Jepang sendiri, diketahui telah berperan besar pada perkembangan ekonomi Korea Selatan, bahkan pasca normalisasi di tahun 1965, Jepang sempat dilihat sebagai salah model contoh pembangunan ekonomi oleh presiden Park Chunghee, yang secara tidak

langsung membuat Korea Selatan dekat dengan perusahaan Jepang dan mulai mengandalkan Jepang sebagai produsen dari barang-barang yang mereka butuhkan untuk menjalankan produksi (Jongsoo, 2019). Tidak terkecuali dalam industri *smartphone* di Korea Selatan, yang secara tidak langsung membuat Jepang memiliki posisi yang sulit untuk digantikan dalam industri ini. Posisi Jepang sebagai produsen bahan kimia yang kapabel ini, secara tidak langsung juga berpengaruh kepada rentetan respons yang dikeluarkan Korea Selatan, yang puncaknya dapat dilihat ketika Jepang mengumumkan untuk membatasi ekspor bahan kimia ke Korea Selatan.

Pertama, pada saat Jepang pertama kali mengumumkan untuk membatasi ekspornya tersebut ke Korea Selatan, yang disertai dengan alasan adanya penyalahgunaan untuk kegiatan keperluan militer. Respons yang dikeluarkan Korea Selatan adalah memberikan klarifikasi yang menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Korea Selatan juga mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dan mengatakan bahwa ada kepentingan politik dibalik pembatasan ekspor ini. Dalam responsnya ini, dapat dilihat bahwa Korea Selatan tidak ingin pembatasan ekspor Jepang ini ditetapkan, karena bisa memberikan dampak kerugian kepada negaranya terkhusus kepada industri *smartphone* mereka.

Walaupun Korea Selatan seakan memberikan tuduhan balik kepada Jepang, tetapi langkah klarifikasi untuk tidak membenarkan tuduhan Jepang tersebut, dapat memiliki arti bahwa Korea Selatan berusaha kembali mendapatkan kepercayaan Jepang agar pembatasan ekspor tersebut bisa dibatalkan.

Kedua, ketika Jepang memutuskan untuk menghapus Korea Selatan dari 'white list' mitra dagang terbaik mereka. Korea Selatan juga merespons hal ini

dengan kebijakan yang cenderung mirip dan bersifat melawan keputusan Jepang tersebut, yaitu Korea Selatan juga menghapus Jepang dari *'white list'* mitra dagang terbaik mereka. Menghapus Jepang dari *'white list'* mitra dagang terbaiknya, tidak langsung dapat menyimpulkan bahwa Korea Selatan bisa lepas dari Jepang sebagai produsen dari bahan kimia untuk keperluan industri *smartphone* mereka. Tetapi, kebijakan Korea Selatan untuk menghapus Jepang dari *'white list'* mitra dagang terbaiknya ini, penulis simpulkan hanya sebagai gertakan yang dibuat untuk menandakan bahwa Korea Selatan tidak takut atau tunduk terhadap Jepang, atau dengan kata lain untuk mengurangi anggapan bahwa Korea Selatan bergantung dengan Jepang pada industri *smartphone* mereka ini. Penulis berpendapat demikian karena pada 29 Agustus 2019, MOTIE Korea Selatan memberikan konfirmasi bahwa Jepang telah menyetujui untuk mengirim sejumlah bahan kimia yang sebelumnya telah mendapat pembatasan ekspor (Yonhap, 2019). Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa, Korea Selatan masih membutuhkan Jepang sebagai produsen dari bahan kimia tersebut. Serta respons Korea Selatan dalam bentuk kebijakan yang turut menghapus Jepang dari *'white list'* mitra dagang mereka, dilakukannya untuk menunjukkan posisi mereka bahwa Korea Selatan tidak takut dengan Jepang, dan tidak akan patuh dengan keputusan pembatasan ekspor, karena Korea Selatan masih membutuhkan Jepang sebagai produsen.

Ketiga, posisi Jepang sebagai produsen yang masih sangat dibutuhkan Korea Selatan, semakin terlihat pada respons ini, yaitu pada saat Korea Selatan menyatakan mereka telah menyelesaikan laporan yang intinya adalah untuk membawa masalah ini ke WTO. Hal ini dilakukan Korea Selatan, karena

terhitung sudah 2 bulan sejak Jepang mengumumkan pembatasan eksportnya tersebut, pihak Jepang masih belum ada menunjukkan kemungkinan untuk membatalkan keputusan mereka tersebut. Dimana, hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah yang salah satunya kerugian bagi Korea Selatan, jika dibiarkan terus berlangsung, tanpa ada tindakan lebih untuk melakukan penyelesaian masalah. Respons Korea Selatan yang memutuskan untuk mengangkat masalah ini ke WTO, menjadi semakin memperjelas bahwa posisi Jepang sebagai produsen bahan kimia yang memenuhi kebutuhan industri *smartphone* Korea Selatan, masih belum tergantikan. Karena, jika Korea Selatan sudah bisa menggantikan posisi Jepang tersebut, seharusnya mereka akan langsung melakukan diversifikasi, ketimbang terus berjuang agar pembatasan ekspor Jepang bisa secepatnya dibatalkan.

Tidak hanya kapabilitas Jepang sebagai produsen bahan kimia untuk kebutuhan industri *smartphone* yang dapat menjadi faktor *non-human environment* dari *setting* eksternal, letak geografis juga demikian. Letak geografis antara Korea Selatan dan Jepang yang membuat kedua negara ini berbatasan secara langsung, juga menjadi salah satu faktor *non-human environment* yang berpengaruh kepada respons Korea Selatan terhadap pembatasan ekspor Jepang. Dimana, kedekatan secara geografis ini menjadi salah satu faktor yang kuat untuk mendorong Korea Selatan tetap mempertahankan posisi Jepang sebagai produsen dari bahan kimia yang mereka butuhkan untuk industri *smartphone* mereka. Sama halnya dengan kapabilitas Jepang sebagai produsen bahan kimia, letak geografis juga berpengaruh kepada kebijakan yang dikeluarkan Korea Selatan untuk merespons pembatasan ekspor

Jepang ini. *Pertama*, pada respons Korea Selatan yang membantah tuduhan Jepang tentang penyalahgunaan bahan kimia untuk kegiatan militer, dapat dilihat bahwa letak geografis menjadikan Korea Selatan harus mengambil kebijakan yang tepat untuk mempertahankan kemitraan mereka dengan Jepang ini. Salah satunya adalah dengan membantah tuduhan Jepang, dan melakukan pembelaan untuk meyakinkan banyak pihak, bahwa negara mereka tidak bersalah dalam sengketa ini. Menurut penulis, Korea Selatan mengeluarkan respons seperti ini, dikarenakan adanya pertimbangan terkait Jepang sebagai produsen yang kebetulan dekat secara geografis dengan negaranya. Dengan begitu, jika dengan pembelaan tersebut bisa membantu untuk membatalkan pembatasan ekspor, maka negaranya tidak perlu lagi mencari produsen baru yang kemudian tidak lebih menguntungkan dari Jepang, karena bisa menambah biaya pengiriman dan menghambat proses produksi, dikarenakan posisi mereka secara geografis yang tidak sedekat Jepang ke Korea Selatan.

Kedua, pada saat Jepang menghapus Korea Selatan dari *'white list'* mitra dagang terbaiknya, Korea Selatan kemudian juga melakukan hal yang sama, yaitu juga turut menghapus Jepang dari *'white list'* mitra dagang terbaik mereka. Dalam respons ini, dapat juga dilihat bahwa letak geografis yang membuat kedua negara ini berdekatan, juga memiliki perannya disini. Korea Selatan dan Jepang dapat dikatakan berada di suatu kawasan dengan persaingan ekonomi yang kompetitif. Dimana, respons Korea Selatan yang memilih untuk menghapus Jepang dari *'white list'* mereka, dapat diartikan sebagai bentuk perlawanan Korea Selatan terhadap Jepang, karena Korea Selatan tidak ingin terlihat kalah ataupun takut dalam bersaing secara ekonomi dari negara tetangganya itu. Selain

itu, kebijakan Korea Selatan untuk menghapus Jepang dari *'white list'* mereka ini, juga bisa diartikan sebagai bentuk perlawanan lain, yang ditujukan untuk setidaknya memberikan Jepang dampak yang sama dengan yang dirasakan negaranya, pada saat Jepang memutuskan untuk menghapus Korea Selatan dari *'white list'* mereka.

Ketiga, pada saat Korea Selatan mengeluarkan respons untuk membawa masalah ini ke WTO, letak geografis sebagai *Non-human environment* juga memberikan pengaruhnya sebagai setting eksternal pada keputusan Korea Selatan ini. Letak geografis, secara tidak langsung memaksa Korea Selatan untuk tetap mempertahankan Jepang sebagai produsen dari bahan kimia yang mereka butuhkan untuk industri *smartphone* di negaranya, setidaknya sampai Korea Selatan bisa melakukan diversifikasi, baik dengan mencari produsen lain ataupun hingga Korea Selatan bisa memproduksi bahan kimia tersebut secara mandiri. Letak geografis, memaksa Korea Selatan agar tetap bisa mendapatkan bahan kimia yang mereka butuhkan dari Jepang. Alasan utamanya adalah, jarak Jepang yang dekat dengan Korea Selatan, membuat waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman bahan tersebut tidaklah lama. Dimana, jika Korea Selatan berhasil menyelesaikan masalah ini di WTO, maka negaranya tidak perlu mencari produsen lain ataupun melakukan produksi sendiri, yang biaya awalnya bisa akan menjadi sangat mahal, jika dibandingkan dengan Korea Selatan tetap menerima ekspor dari Jepang.

Posisi Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, juga dapat dipahami sebagai salah satu faktor *non-human environment* yang dapat berpengaruh kepada kebijakan yang dihasilkan oleh Korea Selatan, karena

perannya yang juga sebagai sebuah *setting* eksternal. Dimana, posisi Jepang ini membuat Korea Selatan merespons keputusan pembatasan ekspor ini, dengan upaya mereka yang memperjuangkan agar hal ini dapat dibatalkan. Hal tersebut dilakukan oleh Korea Selatan, karena jika Korea Selatan tidak berhasil untuk membatalkan pembatasan ekspor oleh Jepang ini, maka perekonomian mereka akan semakin tertinggal jauh oleh Jepang. Jepang sendiri, diketahui telah menempati posisi ke-3 sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2018, dimana posisi Jepang ini hanya berada dibawah Tiongkok dan Amerika Serikat. Sebaliknya, Korea Selatan hanya berhasil menempati posisi ke-11 dalam peringkat ini (Pareira & Sebayang, 2019). Hal tersebut secara tidak langsung, hal yang mempengaruhi rentetan respons yang dikeluarkan Korea Selatan, dalam merespons keputusan pembatasan ekspor Jepang sebagai berikut.

Pertama, pada respons Korea Selatan yang memberikan klarifikasi yang membantah tuduhan Jepang, bahwa Korea Selatan telah menyalahgunakan barang yang di ekspor oleh Jepang untuk kebutuhan militer. Pada saat itu, disamping hanya memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan Jepang, Korea Selatan juga sempat menyampaikan tuduhan balik mereka kepada Jepang, yang mengatakan bahwa keputusan pembatasan ekspor ini, hanyalah sebuah balasan atas tuntutan yang diberikan oleh MA Korea Selatan kepada beberapa perusahaan Jepang, setahun sebelumnya. Tindakan Korea Selatan ini, dapat dikatakan juga secara tidak langsung telah dipengaruhi oleh posisi Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar tersebut. Karena, jika Korea Selatan hanya memberikan klarifikasi, hal tersebut tidak cukup kuat untuk memunculkan kemungkinan yang dapat membantu untuk membatalkan

keputusan Jepang tersebut. Maka dari itu, Korea Selatan juga menyertakan tuduhan balik kepada Jepang, pada saat mereka memberikan klarifikasi, yang mana hal tersebut dapat digunakan untuk memperkuat argumen mereka dan juga mengurangi kredibilitas dari Jepang itu sendiri.

Kedua, pada saat Jepang menghapus Korea Selatan dari *'white list'* mereka, Korea Selatan juga merespons hal ini dengan sebuah langkah yang cenderung sama, yaitu Korea Selatan juga menghapus Jepang dari *'white list'* mereka. Hal ini tentu saja juga telah dipengaruhi oleh adanya pertimbangan terkait posisi Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada saat itu. Dimana, hal ini kemudian mendorong Korea Selatan untuk mengambil langkah yang cenderung sama dengan Jepang. Karena, diketahui Asia Timur merupakan salah satu kawasan dengan persaingan ekonomi yang sangat kompetitif, yang khususnya anatra Korea Selatan dengan Jepang, terdapat rivalitas antara kedua negara ini. Langkah berani Korea Selatan yang juga turut menghapus Jepang dari *'white list'* mereka, dapat diartikan sebagai sebuah langkah yang mana Korea Selatan ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki posisi yang tidak kalah dengan Jepang. Dimana, hal ini juga menunjukkan bahwa Korea Selatan walaupun membutuhkan Jepang, tetapi mereka tetap akan bersaing, dan tidak akan mengalah hanya dikarenakan Jepang mempunyai peringkat perekonomian yang lebih tinggi dari mereka.

Ketiga, pada saat Korea Selatan memutuskan untuk mengangkat masalah ini ke WTO, dengan harapan agar masalah ini bisa diselesaikan secepatnya, juga dapat dikatakan bahwa telah terpengaruh dan telah mempertimbangkan posisi Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar ini. Hal tersebut

dikarenakan bahwa ketika pada akhirnya Korea Selatan telah memutuskan untuk membawa masalah ini ke WTO, pihak mereka sebelumnya telah melihat bahwa tidak ada keinginan dari pihak Jepang itu sendiri, untuk membicarakan masalah ini dengan negaranya. Hal tersebut kemudian didukung oleh adanya fakta bahwa Jepang pada saat itu menduduki posisi ke-3 dari negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada saat itu. Dimana, hal ini kemudian memberikan sebuah pemahaman bagi Korea Selatan, bahwa negaranya harus berusaha ekstra agar keputusan pembatasan ekspor ini dapat dibatalkan. Karena, jika hanya mengandalkan komunikasi secara bilateral, Korea Selatan tetap akan kalah dari Jepang, dikarenakan Jepang memiliki *bargaining position* yang lebih tinggi dari Korea Selatan, yaitu sebagai kekuatan ekonomi dunia yang lebih besar, dan juga sebagai pihak yang dibutuhkan oleh Korea Selatan. Karenanya, Korea Selatan kemudian memutuskan untuk membahas masalah ini ke WTO, dengan harapan bahwa masalah ini akan secepatnya bisa diselesaikan disana.

Non-human environment sebagai *setting* eksternal, dapat dikatakan memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Korea Selatan dalam menghadapi pembatasan ekspor ini. Dari sini, kita bisa melihat bahwa respons yang dikeluarkan Korea Selatan, secara tidak langsung dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak berasal langsung dari manusia, seperti kapabilitas Jepang sebagai produsen bahan kimia yang dibutuhkan untuk industri *smartphone* dan posisi Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada saat itu. Dimana, hal ini kemudian didukung oleh adanya fakta bahwa keduanya memiliki kedekatan secara geografis. Hal-hal tersebut kemudian menjadi sebuah faktor *non-human environment* dari *setting* eksternal

yang kemudian dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan oleh Korea Selatan dalam merespons keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang ini. Dimana, pengaruhnya akan tersampaikan kepada Korea Selatan dengan memaksanya untuk harus bisa membatalkan pembatasan ekspor Jepang ini secepat mungkin, jika negaranya tidak ingin mengeluarkan modal lebih banyak ataupun menderita kerugian.

B. *Other Cultures*

Other cultures, merupakan salah satu faktor dari setting eksternal yang juga dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara. *Other cultures* sendiri, dapat diartikan sebagai suatu budaya yang berasal dari luar atau negara lain, dapat berpengaruh atau memberikan pengaruhnya kepada tindakan atau kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara. Dimana, dalam perseteruan antara Korea Selatan dan Jepang ini, kita bisa melihat *other cultures* sebagai suatu budaya yang tidak berasal dari internal Korea Selatan, yang dalam penelitian ini yaitu budaya dari Jepang itu sendiri. Jepang diketahui sebagai suatu negara yang sangat mempertahankan budaya dari para leluhur, dan juga Jepang tentu saja sangat menghormati para leluhurnya tersebut. Bahkan di Jepang sendiri, ada kegiatan Obon yang merupakan waktu penghormatan bagi orang yang sudah mati, yang biasanya dilakukan di kuil Yasakuni (Schonherr, 2019). Sifat Jepang ini, tidak jarang menyebabkan timbulnya suatu masalah, mengingat generasi terdahulu di Jepang memiliki sisi kelamnya tersendiri. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kependudukan Jepang di beberapa negara di Asia pada masa Perang Dunia II.

Sebagai bangsa yang masih memegang teguh budaya tradisonalnya, Jepang kerap kali memberikan penghormatan kepada para leluhurnya tersebut. Dimana, hal ini sering dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak menyenangkan bagi beberapa negara yang dulunya pernah diduduki oleh Jepang pada masa Perang Dunia II, seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Contohnya adalah pada tahun 2013, kunjungan Shinzo Abe ke kuil Yasakuni mendapat protes dan kecaman keras dari Tiongkok dan Korea Selatan, karena kuil tersebut dianggap sebagai simbol kuat militerisme Jepang pada Perang Dunia II dan kunjungan Abe ini kemudian dianggap sebagai Jepang belum menebus tindakan buruk yang mereka lakukan pada masa Perang Dunia II (McCurry, 2013). Budaya penghormatan Jepang, kepada leluhurnya ini, juga menjadi salah satu hal yang juga ikut memperkeruh suasana pasca pecahnya Perang Dagang antara Korea Selatan dan Jepang ini. Pada tahun 2019, Abe memang tidak lagi mengunjungi kuil Yasakuni, tetapi Abe tetap mengirimkan persembahan untuk ritual di kuil Yasakuni, yang mana hal ini selalu dilakukannya pasca kunjungan langsung di tahun 2013 yang lalu (Kyodo, 2019). Hal ini, tentu saja dapat dianggap sebagai sebuah setting eskternal, yang dalam hal ini dapat berpengaruh kepada kebijakan yang dikeluarkan Korea Selatan dalam responsnya untuk menghadapi pembatasan ekspor oleh Jepang tersebut.

Pertama, pada respons Korea Selatan ketika membantah tuduhan Jepang terkait penyalahgunaan bahan kimia untuk kegiatan militer. *Other cultures*, secara tidak langsung mempunyai perannya tersendiri. Diketahui bersama, Korea Selatan selain memberikan bantahan bahwa tuduhan Jepang tersebut tidak benar, disaat yang sama juga Korea Selatan mengatakan bahwa keputusan

pembatasan ekspor ini adalah sebuah keputusan bermuatan politik yang ditujukan untuk membalas tuntutan MA Korea Selatan kepada perusahaan Jepang. Menurut penulis, apa yang dikatakan Korea Selatan kepada Jepang ini adalah benar adanya. Sebagai bangsa yang menghormati para generasi pendahulunya, Jepang tentu saja tidak terima dengan keputusan MA Korea Selatan untuk kembali memberikan tuntutan terkait ganti rugi kepada korban kerja paksa pada masa Perang Dunia II. Dimana, menurut Jepang hal ini sudah diselesaikan pada saat kedua negara ini menyatakan berdamai melalui perjanjian di tahun 1965.

Pada perjanjian tersebut, selain menyatakan untuk berdamai dengan Korea Selatan, Jepang juga telah membyarkan sejumlah dana ganti kepada Korea Selatan atas apa yang terjadi pada Perang Dunia II, yang kemudian diterima Korea Selatan sebesar US\$ 300 juta dalam bentuk bantuan ekonomi dan US\$ 500 juta pinjaman (Hyonhee, 2019). Jepang juga kemudian lebih lanjut membahas penyelesaian terkait masalah pada Perang Dunia II ini pada pertemuan bilateral kedua negara yang dilaksanakan pada tahun 2015, Jepang juga menyatakan masalah *comfort women* adalah sebuah penghinaan terhadap kehormatan wanita, dan Jepang juga kembali meminta maaf dan menyatakan menyesal atas hal tersebut (MOFA Japan, 2015). Jepang juga setuju untuk membayar sejumlah JP¥ 1 miliar kepada pemerintah Korea Selatan, dan kemudian Jepang menganggap pembahasan mengenai masalah ini telah selesai pada tahun tersebut (Panda, 2017). Rasa tidak puas Jepang kepada Korea Selatan ini, kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang kembali menyebabkan gejolak antara kedua negara ini. Jadi, respons Korea Selatan yang membantah

tuduhan Jepang ini, dapat dikatakan sebagai hasil dari sebuah *setting* eskternal, yaitu tingginya rasa hormat bangsa Jepang kepada leluhurnya, beserta rasa tidak puas Jepang kepada Korea Selatan yang kembali mengungkit masa lalu.

Kedua, pada respons Korea Selatan yang memilih untuk turut menghapus Jepang dari '*white list*' mitra dagang terbaik mereka, setelah sebelumnya Jepang melakukan hal yang sama kepada Korea Selatan. Respons Korea Selatan ini, juga dapat dikatakan telah dipengaruhi oleh *other cultures* sebagai *setting* eskternal. Dimana, Jepang sebagai bangsa yang menghormati leluhurnya, tentu saja tidak senang apabila Korea Selatan selalu menyinggung tentang keburukan leluhur mereka, karena masyarakat Jepang sekarang beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi masa lalu, dan keburukan yang leluhurnya lakukan dahulu, tidak ada hubungannya dengan generasi sekarang (Asian Boss, 2019). Untuk itu, ketika Korea Selatan mengatakan bahwa pembatasan ekspor Jepang adalah sebuah keputusan yang bermuatan politik, tidak sedikit rakyat Jepang yang memberikan dukungan kepada pemerintahnya untuk membungkam Korea Selatan, dengan menghapus Korea Selatan dari '*white list*' negaranya. Jadi, dihapusnya Jepang dari '*white list*' Korea Selatan, dapat dikatakan sebagai hasil dari sebuah *setting* eskternal, yaitu budaya Jepang yang menghormati leluhurnya, kemudian memberikan dukungan kepada pemerintahnya untuk membungkam Korea Selatan, agar berhenti membahas keburukan yang terjadi di masa lalu.

Ketiga, pada saat Korea Selatan memutuskan untuk membawa masalah ini untuk diselesaikan di WTO. Dapat dilihat juga bahwa *other cultures*, atau dalam hal ini yaitu budaya Jepang yang menghormati leluhurnya, juga telah memberikan pengaruhnya kepada tindakan Korea Selatan ini. Hal tersebut

dibuktikan dari tindakan Shinzo Abe, yang tetap mengirimkan persembahan untuk ritual di kuil Yasakuni pada pertengahan Agustus 2019, yang kemudian dinggap sebagai simbol kuat dari militerisme Jepang pada masa Perang Dunia II. Korea Selatan kemudian juga menyatakan bahwa mereka “sangat menyesalkan” tindakan Shinzo Abe ini, yang secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Jepang tidak lupa dengan leluhur mereka yang telah melakukan hal buruk kepada Korea Selatan itu (Yonhap, 2019). Hal ini juga kemudian dapat dikatakan menjadi pemicu, yang semakin menguatkan keinginan Korea Selatan untuk membawa masalah ini ke WTO. Karena, pengormatan terhadap leluhur yang dianggap telah berkelakuan buruk tersebut, dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengisyaratkan bahwa Jepang tidak akan melunak terkait pembatasan ekspor mereka tersebut. Jadi, tindakan Korea Selatan yang membawa masalah ini ke WTO, juga dapat dikatakan sebagai hasil dari sebuah setting eksternal, yang berkaitan dengan penghormatan Jepang kepada leluhurnya tersebut.

Other cultures sebagai salah satu faktor dari setting eksternal, tentu saja dapat memberikan pengaruh yang sama seperti faktor dari setting eksternal yang sebelumnya, dalam hal mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan oleh negara lain. Terkait persetujuan Korea Selatan dengan Jepang ini, budaya Jepang yang sangat menghormati leluhurnya, dapat dikatakan sebagai sebuah setting eksternal yang kemudian dapat digolongkan menjadi *other cultures*, yang kemudian secara tidak langsung berpengaruh kepada kebijakan yang dihasilkan Korea Selatan sebagai bentuk respons dari keputusan pembatasan ekspor yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Jepang.

C. *Other Societies*

Other societies, merupakan faktor lain dari setting eksternal, yang juga bisa berpengaruh kepada kebijakan yang akan dihasilkan oleh suatu negara. *Other societies* ini sendiri, dapat diartikan menjadi bagaimana masyarakat dari negara lain, dapat berpengaruh kepada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh negara lainnya. Dalam penelitian ini, *other societies* dapat dilihat sebagai masyarakat Jepang, yang baik pendapat hingga tindakan mereka dapat berpengaruh kepada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan, khususnya dalam mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk menghadapi pembatasan ekspor yang dikeluarkan oleh Jepang itu sendiri. Terkait posisinya dalam persetujuan antara Korea Selatan dan Jepang ini, sebagian besar dari masyarakat Jepang berada di posisi yang mana mereka mendukung keputusan pemerintahnya ini, yaitu untuk memberlakukan pembatasan ekspor bahan kimia ke Korea Selatan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Nikkei-TV Tokyo pada tahun 2019, 67% responden mendukung keputusan pemerintah Jepang untuk memberlakukan pembatasan ekspor yang sebelumnya pada akhir Juli jumlahnya hanya sekitar 58%, dengan jumlah responden yang menolak keputusan tersebut hanya sekitar 19%, dan sisanya adalah mereka yang belum memutuskan untuk mendukung keputusan pemerintahnya atau tidak (Takeuchi, 2019). Jumlah sebagian besar masyarakat Jepang yang setuju dan mendukung pemerintahnya untuk memberlakukan pembatasan ekspor ini, tentu saja berpengaruh kepada rentetan kebijakan Korea Selatan yang dikeluarkan untuk menghadapi pembatasan ekspor tersebut.

Pertama, pada respons Korea Selatan yang membantah tuduhan Jepang terkait penyalahgunaan bahan kimia untuk kegiatan militer, kita dapat melihat bahwa respons Korea Selatan ini, secara tidak langsung sudah mendapat pengaruh dari *other societies* yaitu dukungan masyarakat Jepang kepada keputusan pemerintahnya. Jika dilihat kebelakang sedikit lagi, Korea Selatan bisa mengeluarkan respons berupa bantahan tersebut, tentu saja ditujukan untuk menyatakan bahwa perkataan Jepang yang mengatakan bahwa Korea Selatan telah salah menggunakan bahan kimia yang mereka ekspor tersebut, adalah tidak benar. Dukungan yang diberikan masyarakat Jepang kepada pemerintahnya, dapat dipahami sebagai *other society*, yang perannya adalah memperkuat alasan pemerintahnya untuk memberlakukan pembatasan ekspor ke Korea Selatan. Dimana, dari dukungan yang kemudian memperkuat alasan pembatasan ekspor Jepang ini, menghasilkan respons berupa Korea Selatan yang menyatakan bahwa alasan Jepang yang kemudian dianggap sebagai tuduhan tersebut adalah tidak benar, hingga Korea Selatan menambahkan dalam responsnya ini, bahwa pembatasan ekspor Jepang adalah sebuah tindakan yang bermuatan politik.

Kedua, pada respons Korea Selatan yang juga memutuskan untuk menghapus Jepang dari *'white list'* mereka, setelah sebelumnya Jepang melakukan hal yang sama kepada Korea Selatan, *other societies* juga berpengaruh disini. *Other societies* mulai memberikan pengaruhnya kepada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Korea Selatan, dimulai dari dukungan yang mereka berikan kepada pemerintahnya, yaitu membenarkan tindakan pemerintah Jepang ketika mereka menghapus Korea Selatan dari *'white list'* mereka. Hal ini juga tentu saja bisa memberikan pengaruh kepada kebijakan

serupa yang kemudiann dikeluarkan oleh Korea Selatan, karena dukungan ini diberikan oleh sebagian besar masyarakat Jepang. Dilihat dari survey yang dilakukan oleh Nikkei-TV Tokyo sebelumnya, hanya ada sekitar 13% responden yang belum memutuskan apakah mereka mendukung keputusan pemerintah Jepang, dan sisanya adalah mereka yang setuju dengan jumlah 67% dari responden (Takeuchi, 2019). Sebagian besar masyarakat Jepang yang memutuskan untuk mendukung dan membenarkan keputusan pemerintahnya untuk mengapus Korea Selatan dari 'white list' negara mereka ini, secara tidak langsung memberikan pengaruh kepada kebijakan yang dikeluarkan Korea Selatan untuk merespons hal ini, yaitu Korea Selatan kemudian juga memutuskan untuk menghapus Jepang dari 'white list' mereka.

Ketiga, pada saat Korea Selatan merespons pembatasan ekspor oleh Jepang yang masih belum selesai ini, dengan mengangkat masalah tersebut untuk diselesaikan ke WTO, *other societies* juga berpengaruh disini. Kembali melihat survey yang dilakukan oleh Nikkei-TV Tokyo pada tahun 2019 sebelumnya, hanya ada sekitar 21% responden yang menyatakan mereka mendukung kedua negara ini untuk secepatnya melakukan kompromi agar masalah ini cepat selesai (Takeuchi, 2019). Disini dapat dilihat bahwa tidak banyak masyarakat Jepang yang mendukung untuk masalah ini diselesaikan secepatnya. Hal ini, secara tidak langsung memberikan dukungan yang menunjukkan bahwa tidak akan ada upaya dari pihak Jepang untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat. Kemudian pengaruhnya kepada Korea Selatan adalah mereka kemudian memutuskan untuk membawa masalah ini ke WTO, untuk diselesaikan disana. Sebagian besar masyarakat Jepang yang memilih untuk tidak mendukung

penyelesai masalah secepatnya, menjadikan masalah ini semakin tidak menunjukkan titik terang dalam waktu dekat. Hal ini kemudian menjadi sebuah *setting* eksternal, yang pengaruhnya adalah kebijakan Korea Selatan untuk membawa masalah ini ke WTO.

Other societies sebagai salah satu faktor dari setting eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara, tentu saja punya peran yang signifikan dalam masalah ini, khususnya dalam kebijakan yang dikeluarkan Korea Selatan dalam merespons keputusan Jepang untuk membatasi ekspornya tersebut. Dalam hal ini, sebagian besar masyarakat Jepang yang setuju dan membenarkan tindakan pemerintahnya, menjadi salah satu hal yang membuat masalah ini masih belum terselesaikan. Kemudian, hal ini juga secara tidak langsung, memberikan pengaruhnya kepada rentetan respons yang dikeluarkan Korea Selatan, dalam menghadapi Jepang agar pembatasan ekspor oleh Jepang ini bisa secepatnya dibatalkan.

D. *Societies Organized and Functioning as States and Government Action*

Societies Organized and Functioning as States and Government Action adalah faktor terakhir dari setting eksternal, yang juga sama seperti beberapa faktor sebelumnya, juga dapat berpengaruh kepada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh suatu negara, atau dalam hal ini, negara lainnya. Dalam penelitian ini, *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* dapat dilihat sebagai Jepang sebagai negara dan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Lebih lanjut, dalam penelitian ini *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* yang akan dibahas adalah beberapa tindakan Jepang yang ditujukan kepada Korea Selatan. Dimana,

yang menjadi awal dari hal ini adalah keputusan Jepang untuk memberlakukan pembatasan ekspor kepada Korea Selatan, yang kemudian membatasi ekspor 3 jenis bahan kimia yang kemudian dibutuhkan Korea Selatan sebagai bahan baku untuk industri *smartphone* mereka.

Walaupun pembatasan ekspor ini dianggap bermuatan politik, yaitu sebagai balasan kepada MA Korea Selatan yang memberikan tuntutan perusahaan Jepang, tetapi Jepang memiliki alasan tersendiri untuk melakukan pembatasan ekspor ini. Jepang sendiri, memiliki alasan untuk memberlakukan pembatasan ekspor. Alasan dari Jepang tersebut, adalah karena Korea Selatan dianggap telah salah menggunakan bahan-bahan kimia ini, diantaranya adalah penggunaan bahan-bahan kimia tersebut untuk kegiatan militer, dan juga adanya laporan bahwa telah terjadi sekitar 156 kasus ekspor ilegal sepanjang tahun 2015 hingga 2019 di Korea Selatan (Furukawa & Sneider, 2019). Dari beberapa alasan tersebut, akhirnya pemerintah Jepang kemudian menetapkan pembatasan ekspornya pada Juli 2019. Tindakan Jepang ini, kemudian dapat dipahami sebagai sebuah setting eksternal, yang kemudian berpengaruh rentetan kebijakan atau tindakan yang dikeluarkan Korea Selatan sebagai respons dari tindakan Jepang tersebut.

Pertama, Korea Selatan membantah tuduhan Jepang yang telah mengatakan bahwa negaranya telah menyalahgunakan bahan kimia untuk keperluan militer. *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* sebagai setting eksternal, tentu saja sudah memberikan pengaruhnya kepada tindakan Korea Selatan ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Jepang beralasan bahwa pembatasan ekspor yang mereka lakukan, bukanlah suatu tindakan yang

bermuatan politik, melainkan karena menyangkut isu keamanan. Karena berdasarkan data yang telah didapat oleh Fuji-TV, telah terjadi sekitar 156 kasus ekspor ilegal di Korea Selatan, sepanjang tahun 2015 hingga 2019 (Furukawa & Sneider, 2019). Korea Selatan yang merasa tidak terima dengan tuduhan Jepang tersebut, kemudian menjawabnya dengan pembelaan bahwa hal tersebut tidak benar. Di kesempatan yang sama, Korea Selatan juga mengatakan bahwa pembatasan ekspor ini adalah sebuah keputusan yang bermuatan politik, dan dilakukan karena Jepang tidak terima atas keputusan MA Korea Selatan yang memberikan tuntutan kepada perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi. Dapat dikatakan bahwa keputusan Korea Selatan ini, adalah sebuah respon yang tercipta dari setting eksternal, yaitu tindakan pemerintah Jepang untuk memberlakukan pembatasan ekspor.

Kedua, pada saat Korea Selatan memutuskan untuk turut menghapus Jepang dari 'white list' mitra dagang terbaik mereka. Kebijakan Korea Selatan ini, juga sudah bisa dikatakan sebagai hasil dari sebuah setting eksternal. Dimana, tindakan Jepang yang sebelumnya lebih dulu menghapus Korea Selatan dari 'white list' mereka, dapat digolongkan sebagai *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* yang merupakan sebuah setting eksternal. Keputusan Korea Selatan untuk menghapus Jepang dari 'white list' mereka ini, tentu saja merupakan sebuah kebijakan yang pada masa pembuatannya sudah terpengaruh oleh suatu setting eksternal, yaitu tindakan serupa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Jepang. Walaupun dapat dikatakan bahwa masyarakat Korea Selatan juga berperan dalam kebijakan ini, karena sebelumnya dilakukan proses pengambilan suara untuk menentukan

apakah Jepang akan dihapus dari 'white list' Korea Selatan atau tidak. Tetapi, jika dilihat sedikit lagi kebalakang, mayoritas masyarakat Korea Selatan yang berpartisipasi pada pengambilan suara tersebut, sudah terlebih dahulu “terbawa emosi” kepada Jepang yang sudah lebih dulu melakukan tindakan serupa kepada negara mereka. Jadi, dapat dikatakan bahwa kebijakan Korea Selatan untuk menghapus Jepang dari 'white list' mereka, merupakan hasil atau respons dari sebuah setting eksternal yang telah terjadi. Dimana, setting eksternal tersebut adalah tindakan Jepang yang telah lebih dulu menghapus Korea Selatan dari 'white list' negara mereka.

Ketiga, pada saat Korea Selatan memutuskan untuk membahas lebih lanjut masalah ini ke WTO agar bisa diselesaikan, pada bulan September 2019, tindakan Korea Selatan ini, dapat dikatakan juga sudah dipengaruhi oleh sebuah *setting* eksternal. *Setting* eskternal tersebut tentu saja adalah tindakan Jepang untuk menetapkan pembatasan ekspornya tersebut, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan berencana untuk menegosiasikan kembali ataupun mencabut pembatasan ekspor yang telah mereka tetapkan tersebut (Yamaguchi & Tonghyung, 2019). Tindakan Jepang ini, kemudian dapat dipahami sebagai sebuah *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* yang merupakan *setting* eskternal yang kemudian bisa berdampak kepada suatu tindakan atau kebijakan yang akan dihasilkan oleh Korea Selatan dalam merespons hal ini. Kemudian, karena belum juga menunjukkan tanda-tanda bahwa pembatasan ekspor ini akan selesai atau dibatalkan oleh Jepang, akhirnya Korea Selatan kemudian membawa masalah ini ke WTO pada 12 September 2019, dengan tujuan agar masalah ini bisa diselesaikan disana (Hyunjoo, 2019).

Tindakan Korea Selatan yang membawa masalah ini ke WTO tersebut, dapat dikatakan merupakan hasil dari sebuah *setting* eksternal yang sebelumnya sudah dibuat oleh Jepang. Dimana, *setting* eksternal tersebut adalah keputusan Jepang untuk melakukan pembatasan ekspor, dan pernyataan dari Jepang yang mengatakan bahwa keputusan mereka ini sudah final.

Sebagai sebuah faktor dari *setting* eksternal, *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* dapat dikatakan memiliki peran yang sangat signifikan dalam memainkan tugasnya untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan yang akan dikeluarkan oleh negara lain, atau dalam hal ini adalah Korea Selatan. *Societies Organized and Functioning as States and Government Action* juga dapat dikatakan sebagai *setting* eksternal yang mengawali proses aksi-reaksi antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan dan Jepang. Dimana, tindakan Jepang yang memutuskan untuk memberlakukan pembatasan ekspor adalah sebuah *setting* eksternal yang menjadi awal dari proses aksi-reaksi kebijakan dari kedua negara ini.

الجمعة الاستاذة الانيمة

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlakuan buruk yang dirasakan Korea Selatan pada masa kependudukan Jepang di Perang Dunia II, masih menyisakan kenangan buruk tersendiri di kalangan rakyat Korea Selatan hingga saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya jumlah warga dari wilayah kependudukan Jepang termasuk Korea Selatan, yang kemudian menjadi korban kerja paksa dan *jugun ianfu* (*comfort women*) untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial Jepang pada saat itu. Korea Selatan dan Jepang, telah menyatakan untuk berdamai melalui sebuah perjanjian di tahun 1965. Dimana, perjanjian ini juga membahas penyelesaian masalah pada masa kependudukan Jepang, yang membuat Jepang membayar sejumlah dana ganti rugi kepada Korea Selatan. Hal tersebut juga kemudian dipertegas melalui sebuah pertemuan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2015, yang salah satunya dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah pada Perang Dunia II.

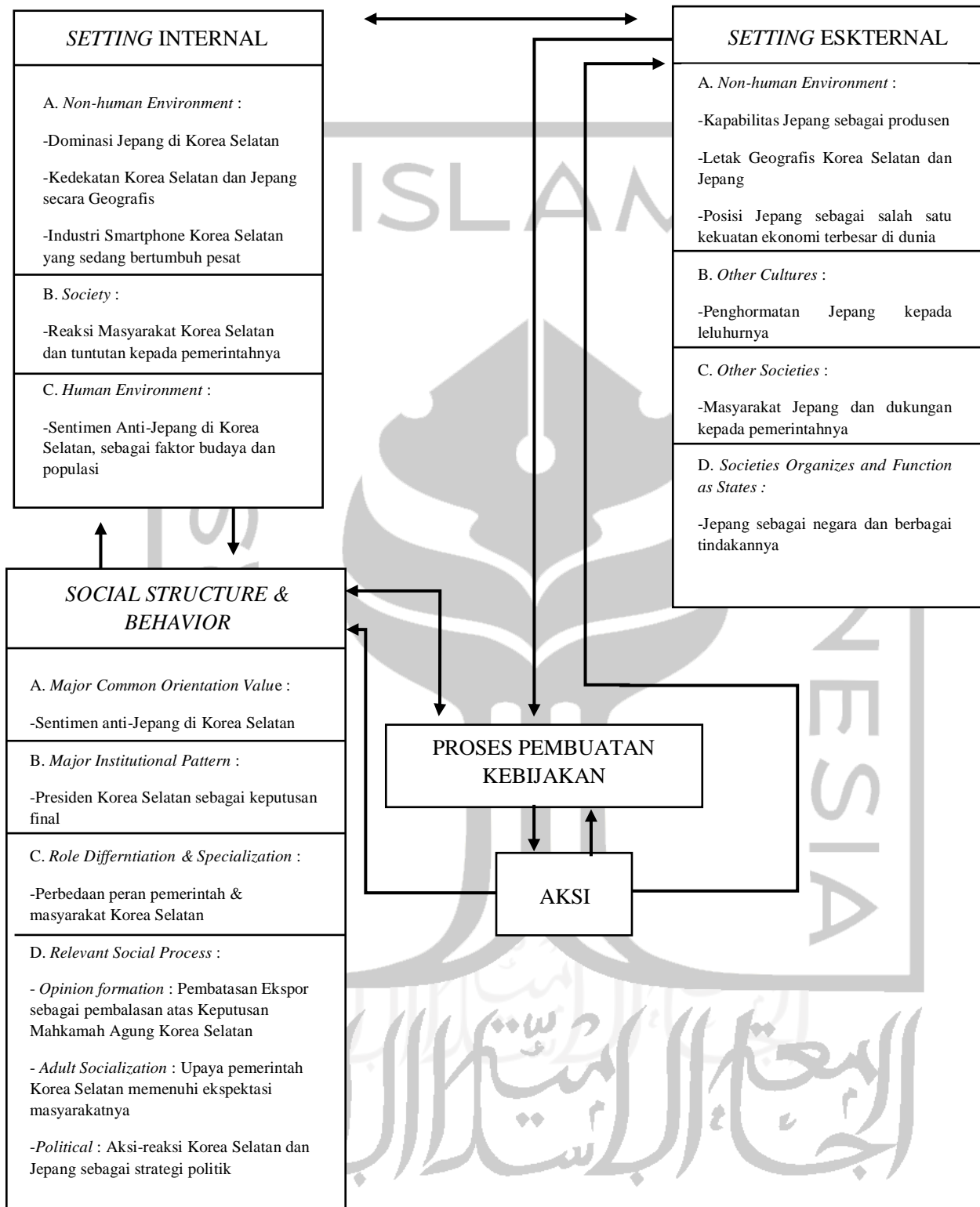
Terkait hubungan Korea Selatan dengan Jepang, masa lalu terkait Perang Dunia II ini, masih menjadi polemik tersendiri yang tidak jarang menciptakan suatu ketegangan pada hubungan kedua negara ini. Khususnya pada tahun 2019, hubungan antara Korea Selatan kembali mengalami ketegangan, karena Jepang menetapkan sebuah keputusan untuk membatasi ekspornya pada beberapa bahan kimia yang kemudian dibutuhkan Korea Selatan untuk industri *smartphone* mereka. Korea Selatan kemudian menganggap bahwa keputusan Jepang ini diambil sebagai tindakan balasan atas rasa tidak puas Jepang atas putusan yang

ditetapkan Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018. Dimana, pada tahun tersebut Mahkamah Agung Korea Selatan kembali memberikan tuntutan kepada beberapa perusahaan Jepang untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada warga Korea Selatan yang menjadi korban kerja paksa di Perang Dunia II. Hal tersebut kemudian membawa Korea Selatan dan Jepang ke dalam situasi yang dikenal dengan nama Perang Dagang.

Korea Selatan setidaknya mengeluarkan beberapa respons pasca Jepang menetapkan pembatasan eksportnya, yang kemudian membawa kedua negara ini ke dalam situasi Perang Dagang. Respons Korea Selatan tersebut, diantaranya adalah 1.) Membantah tuduhan Jepang yang mengatakan Korea Selatan telah salah menggunakan bahan kimia yang mereka ekspor dengan digunakan untuk keperluan militer 2.) Menghapus Jepang dari 'white list' mitra dagang terbaik mereka, dan 3.) Membawa masalah pembatasan Ekspor ini ke *World Trade Organization*, agar secepatnya bisa diselesaikan. Analisis dari penelitian ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana konsep *setting* dapat berpengaruh kepada kebijakan atau tindakan yang diambil Korea Selatan sebagai respons dari keputusan Jepang untuk melakukan pembatasan ekspor tersebut.

Sebagai analisis, penulis turut menggunakan 2 pembagian dari konsep *setting* yang menjadikan analisis ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu menggunakan *setting* internal dan *setting* eksternal, yang lebih lanjut dapat dilihat melalui *flowchart* Snyder dan penjelasan di bawah ini, sebagai berikut.

Flowchart Snyder Sebagai Gambaran Penelitian



*Flowchart, untuk menggambarkan kesimpulan dari penelitian

Dalam *setting* internal, penulis menemukan bahwa rentetan respons yang dikeluarkan Korea Selatan untuk menghadapi Jepang dalam kasus ini, sebagian besar masih dipengaruhi oleh rasa sakit hati rakyat Korea Selatan terkait perlakuan buruk Jepang pada Perang Dunia II, yang mana hal ini kemudian menyebabkan tingginya sentimen rakyat Korea Selatan kepada Jepang. Hal ini menjadi semakin parah pasca Jepang menetapkan pembatasan ekspor mereka, yang kemudian menjadikan rakyat Korea Selatan mendorong pemerintahnya untuk mengambil kebijakan atau tindakan yang bersifat ofensif kepada Jepang. Selain itu, Korea Selatan yang secara geografis berdekatan dengan Jepang, juga adanya dominasi Jepang di pasar Korea Selatan, juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Korea Selatan untuk mengambil arah kebijakan yang dapat secepatnya bisa menyelesaikan pembatasan ekspor Jepang ini.

Pada *setting* eksternal, yang kemudian dapat dipahami sebagai suatu faktor yang berasal dari luar Korea Selatan atau dalam hal ini adalah Jepang. Penulis kemudian dapat menyimpulkan bahwa budaya Jepang yang menghormati leluhurnya merupakan salah satu faktor mendasar yang kemudian secara tidak langsung dapat berpengaruh kepada rentetan respons yang dikeluarkan Korea Selatan baik dalam bentuk kebijakan atau tindakan untuk menghadapi keputusan pembatasan ekspor oleh Jepang ini. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh sifat rakyat Jepang yang cenderung mendukung keputusan pemerintahnya, yang mana dalam hal ini kebijakan tersebut dianggap Korea Selatan sebagai sesuatu yang merugikan negaranya. Selain itu, posisi Jepang sebagai produsen yang kapabel, sekaligus sebagai salah satu negara terdekat dari Korea Selatan secara geografis, juga turut menjadi salah satu pengaruh yang menyebabkan Korea

Selatan mengambil arah kebijakan yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya.

Proses pengambilan kebijakan di Korea Selatan, tidak semata-mata hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab sebagai pembuat kebijakan. Dalam proses perumusannya, kebijakan di Korea Selatan juga diambil melalui penyaringan opini yang ada di masyarakatnya juga. Dimana, hal ini memungkinkan masyarakat Korea Selatan juga bisa mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahnya, yang mana hal ini disebut sebagai *setting* internal. Tidak hanya itu, proses pengambilan kebijakan di Korea Selatan, dalam perumusannya juga dilakukan melalui adanya pertimbangan terkait suatu kebijakan atau keputusan dari negara lainnya, yang dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai *setting* eksternal, yaitu keputusan Jepang yang kemudian berpengaruh kepada kebijakan yang dihasilkan oleh Korea Selatan. Barulah, setelah *setting* tadi memberikan pengaruhnya kepada proses perumusan kebijakan, maka kemudian pemerintah Korea Selatan akan menghasilkan suatu kebijakan, yang dari proses perumusannya sudah dipengaruhi oleh *setting* tadi, atau dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dihasilkan adalah *output* dari *setting* itu sendiri. Sebagai penutup, dikarenakan masalah antara Korea Selatan dan Jepang ini masih belum selesai, besar harapan penulis bahwa penelitian dengan topik ini dapat dilanjutkan seterusnya, terkhusus di Universitas Islam Indonesia ini sendiri. Untuk itu, penulis akan mencoba memberikan beberapa rekomendasi yang kemudian diharapkan bisa memudahkan untuk penelitian dengan topik yang sama dilakukan kembali.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, beserta pemaparan yang juga telah penulis tuliskan diatas sebelumnya, diketahui bahwa masih belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas terkait perselisihan antara Korea Selatan dan Jepang ini. Mengingat perselisihan antara Korea Selatan dan Jepang ini yang masih belum menemukan titik terang, menurut penulis sangat penting agar kedepannya bisa lebih banyak lagi penelitian yang bisa melanjutkan pembahasan terkait masalah ini. Karena beberapa penelitian yang ada sebelumnya sebagian besar hanya membahas tentang sejarah Korea Selatan dengan Jepang, beserta kebijakan ekonomi yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Besar harapan penulis bahwa kedepannya akan banyak penelitian yang juga bisa membahas hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, yang kemudian bisa membantu melengkapi kekurangan di studi ini. Penulis juga berharap bahwa kedepannya akan ada penelitian yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini, mengingat pentingnya peran Korea Selatan dan Jepang sebagai kekuatan ekonomi yang besar di Asia saat ini.

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

Daftar Pustaka

- ASEAN Organization. (2016, October 3). *Regional Comprehensive Economic Partnership*. Diambil kembali dari ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATION: https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership
- Asian Boss. (2019, Agustus 6). *Japanese React To The Japan-South Korea Trade War [Vidio]*. Diambil kembali dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=d89JU5Efi6Y&list=LL&index=14>
- Burchil, S. (2005). *Theory of International Relations*. Houndmills: MACMILLAN.
- Canalys. (2019, Januari 29). *Apple ships 71.7m smartphone in Q4 2018 as global market falls 6%*. Diambil kembali dari Canalys: <https://www.canalys.com/newsroom/apple-ships-717m-smartphones-in-q4-2018-as-global-market-falls-6>
- Capling, A. (2008). *Twenty Years Australia Engagement with Asia*. Australia: The Pacific Review.
- Chang, M. (2009). The Politics of an Apology: Japan and Resolving the "Comfort Women" Issue. *Harvard International Review*, Vol. 31, No. 3 (FALL 2009),, 34-37.
- CHONG WA DAE. (2019, April 1). *Opening Remarks by President Moon Jae-in at Meeting with Leaders of Civil Society Organizations*. Diambil kembali dari THE REPUBLIC OF KOREA - CHONG WA DAE: <https://english1.president.go.kr/BriefingSpeeches/Policies/561>
- Chun, J.-h. (2016). The role of Japan's civil society organizations and the deteriorating relationship between Japan and South Korea. *International Journal Vol.71 (1) 88-106*, 88-106.
- Church, P. (2009). *History of Southeast Asia*. Singapore: John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.
- Connolly, M., & Yi, K.-M. (2015). How Much of South Korea's Growth Miracle Can Be Explained by Trade Policy? *American Economic Journal: Macroeconomics 2015*, 7(4): 188–221, 188-215.
- Denyer, S. (2019, Februari 9). *Japan-South Korea ties 'worst in five decades' as U.S. leaves alliance untended*. Diambil kembali dari The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/japan-south-korea-ties-worst-in-five-decades-as-us-leaves-alliance-untended/2019/02/08/f17230be-2ad8-11e9-906e-9d55b6451eb4_story.html?noredirect=on

- Furukawa, K., & Sneider, D. (2019, September 24). *RESOLVED: Japan Has More to Gain Than to Lose from Its Export Controls on South Korea*. Diambil kembali dari Center for Strategic International Studies: 2019
- Hahm, S. D., & Heo, U. (2019). History and Territorial Disputes, Domestic Politics, and International Relations : An Analysis of the Relationship among South Korea, China, and Japan. *KOREA OBSERVER*, Vol. 50, No. 1, Spring 2019, pp.53-80, 55-58.
- Hamdi, A. S., & Baharuddin, E. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Sleman: Deepublish.
- Handley, E. (2019, Juli 28). *What does Japan and South Korea's tech trade dispute mean for the cost of your smartphone?* Diambil kembali dari ABC News Australia: <https://www.abc.net.au/news/2019-07-28/what-does-japan-south-korea-trade-war-mean-for-smartphone-costs/11341254>
- Hara, A. E. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.
- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hartono, M. (2008). NASIONALISME ASIA TIMUR: SUATU PERBANDINGAN JEPANG, CINA, DAN KOREA. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12.
- Horowitz, S. (2016). South Korea and Japan since World War II: Between Ideological Discord and Pragmatic Cooperation. *Pacific Focus* 31, 79-99.
- Hyonhee, S. (2019, Juni 19). *Japan rejects Korean fund plan to compensate forced wartime labor*. Diambil kembali dari Japan rejects Korean fund plan to compensate forced wartime labor: <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-forcedlabour-idUSKCN1TK149>
- Hyunjoo, J. (2019, September 11). *Seoul to file WTO complaint over Japan's 'discriminatory' export curbs*. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-idUSKCN1VW019>
- Hyunsook, P. (2007). Baekje's Relationship with Japan in the 6th Century. *International Journal of Korean History*(Vol.11, Dec. 2007), 5.
- Ismanto, I. (2010). Perubahan Ekonomi Global dan Tantangan bagi Indonesia. *Tantangan ekonomi untuk Indonesia*.
- Jaewon, K. (2018, Oktober 30). *Seoul court orders Nippon Steel to compensate wartime workers*. Diambil kembali dari Nikkei Asia: <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Seoul-court-orders-Nippon-Steel-to-compensate-wartime-workers>

- Jongsoo, L. (2019, Agustus 19). *Trade Dependence and Politicization: Lessons From the Japan-Korea Conflict*. Diambil kembali dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2019/08/trade-dependence-and-politicization-lessons-from-the-japan-korea-conflict/>
- KBS World Radio. (2019, Juli 4). *NSC: Japanese Export Restriction "Political Revenge" against Supreme Court Rulings*. Diambil kembali dari KBS World Radio: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?Seq_Code=146419
- Keeho, Y. (2019, Agustus 3). *Resolving the Korea-Japan dispute over compensation for forced labor victims*. Diambil kembali dari Korea.net: <http://www.korea.net/NewsFocus/Column/view?articleId=173776>
- Kementrian Perdagangan Indonesia. (2018, May 30). *ASEAN-China Free Trade Agreement*. Diambil kembali dari Kementrian Perdagangan Indonesia: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>
- Kim, H. (2011). The Role of Political Leadership in the Formation of Korea-Japan Relations in the Post-. *Asian Perspective, Vol. 35, No. 1 (Jan.-Mar. 2011), pp. 111-134, 130-132.*
- Korea Now. (2019, Juli 18). *Koreans react to Japan's export curbs on S. Korea [Video]*. Diambil kembali dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=Vqs7NfF6Drs&t=2s>
- Kriekhaus, J. (2017). Geopolitics and South Korea's Economic Success. *Asian Perspective 41 (2017), 43-69, 59-65.*
- Kyodo. (2019, Agustus 15). *Abe sends ritual offering to war-linked Yasukuni Shrine on anniversary of WWII surrender*. Diambil kembali dari Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/08/15/national/politics-diplomacy/abe-sends-ritual-offering-war-linked-yasukuni-shrine-2/>
- Kyodo. (2019, Mei 2). *South Korea's Moon Jae-in says ties with Japan must be improved*. Diambil kembali dari Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/05/02/national/politics-diplomacy/south-koreas-moon-jae-says-ties-japan-must-improved/#.XaXnWUYzaMp>
- Laporan Triwulan BAPPENAS. (2013). *Perkembangan Ekonomi Indonesia*. Indonesia: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS.
- Lau, L. J. (2018). A Better Alternative to a Trade War. *IGEF Working Paper No. 64, 4.*
- Lyke, B. (2016). *Does Trade Openness Matter for Economics Growth in CEE Countries?* Muenchen: Deakin University.

- McCurry, J. (2013, Desember 26). *Japan's Shinzo Abe angers neighbours and US by visiting war dead shrine*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2013/dec/26/japan-shinzo-abe-tension-neighbours-shrine>
- MOFA Japan. (2015, Desember 28). *Ministry of Foreign Affairs of Japan*. Diambil kembali dari Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion: https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html
- National Archives. (2016, September 7). *US Enters the Korean Conflict*. Diambil kembali dari National Archives: <https://www.archives.gov/education/lessons/korean-conflict>
- Obayashi, Y. (2019, Juli 30). *Japan to tighten export rules for high-tech materials to South Korea: media*. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-laborers/japan-to-tighten-export-rules-for-high-tech-materials-to-south-korea-media-idUSKCN1TV089>
- Panda, A. (2017, Januari 9). *The 'Final and Irreversible' 2015 Japan-South Korea Comfort Women Deal Unravels*. Diambil kembali dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/01/the-final-and-irreversible-2015-japan-south-korea-comfort-women-deal-unravels/>
- Pareira, S. I., & Sebayang, R. (2019, Juli 29). *Korsel Vs Jepang: Otomotif Hingga Elektronika, Siapa Juara?* Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726190407-4-87969/korsel-vs-jepang-otomotif-hingga-elektronika-siapa-juara>
- Qonita, M. I. (2019). Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dalam Pemasangan Sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). *Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 4, 2019, hal 797-806.*, 799.
- Ruide, K. (2019, Juli 19). *Popular Korean YouTuber boycotts Japan by shredding flight ticket to pieces at airport*. Diambil kembali dari Japan Today: <https://japantoday.com/category/entertainment/popular-korean-youtuber-boycotts-japan-by-shredding-flight-ticket-to-pieces-at-airport>
- S.C. (2013, November 5). *Why is the border between the Koreas sometimes called the "38th parallel"?* Diambil kembali dari The Economist explains: <https://www.economist.com/the-economist-explains/2013/11/05/why-is-the-border-between-the-koreas-sometimes-called-the-38th-parallel>
- Sadiaa M., J. R. (2014). *The Oxford Handbook of The International Relations of Asia*. London: Oxford University Press.

- Schonherr, J. (2019, Juli 24). *Mitama Festival Yasukuni*. Diambil kembali dari Japan Visitor: <https://www.japanvisitor.com/japanese-festivals/mitama-yasukuni#:~:text=Mitama%20Festival%2C%20Yasukuni%20Shrine%2C%20Tokyo%20%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A%20%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC&text=In%20Japa>
- Shin, J. H. (2019, Juli 11). *[News Analysis] Why is Korea so dependent on Japanese materials?* Diambil kembali dari The Korean Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190711000653>
- Snyder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, B. (2002). *Foreign Policy Decision Making*. New York: Palgrave MacMillan.
- Steele, W. M. (1990). Edo in 1868. The View from Below. *Monumenta Nipponica, Vol. 45, No. 2 (Summer, 1990), pp. 127-155, 127.*
- Swope, K. M. (2002). Deceit, Disguise, and Dependence: China, Japan, and the Future of the Tributary System, 1592-1596. *The International History Review, Vol. 24, No. 4 (Dec., 2002), pp. 757-782, 761-762.*
- Taegy, K., & Cawley, K. N. (2011, Desember 28). *Korea's first united kingdom: Unified Silla*. Diambil kembali dari Korea Time's: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2011/12/113_101790.html
- Takeuchi, Y. (2019, September 2). *Japanese support deepens for South Korea trade curbs: Nikkei poll*. Diambil kembali dari Nikkei Asia: <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-South-Korea-rift/Japanese-support-deepens-for-South-Korea-trade-curbs-Nikkei-poll#:~:text=Japan%20restricted%20exports%20of%20vital,trusted%20trade%20partners%20in%20August.&text=The%20trade%20curbs%20received%20sup>
- Thonthowi, H. (2019). *SKRIPSI - KEPUTUSAN ISRAEL MENDUKUNG REFERENDUM KEMERDEKAAN KURDISTAN*. Jember: Universitas Jember.
- Tong-Hyung, K. (2019, Agustus 5). *Moon calls for 'peace economy' with N. Korea, slams Japan*. Diambil kembali dari AP News: <https://apnews.com/article/f09bce1130ec432fada58c58dc6e1f74>
- Trefis, T. (2020, Februari 1). *How Does Samsung Make Money?* Diambil kembali dari Forbes: <https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/01/02/how-does-samsung-make-money/?sh=6dc6de71123b>
- Turnbull, S. (2002). Samurai Invasion - Japan's Korean War 1592 -1598. Dalam S. Turnbull, *Samurai Invasion - Japan's Korean War 1592 -1598* (hal. 10-12). London: Cassell & Co.

- Wang, V. W.-C. (2006). China Economic Statecraft Toward Southeast Asia Free Trade Agreement and "Peaceful Rise". *American Journal of Chinese Studies*, 5-34.
- Xinhua. (2019, September 18). *S.Korea implements removal of Japan from whitelist of trusted export partners*. Diambil kembali dari China.org.cn: http://www.china.org.cn/business/2019-09/18/content_75217660.htm
- Yamaguchi, M., & Tonghyung, K. (2019, Juli 10). *Japan says it won't discuss or retract SKorea export rules*. Diambil kembali dari ABC News: <https://abcnews.go.com/International/wireStory/japan-plan-talks-retract-trade-decision-skorea-64208792>
- Yi, K. J. (2002). In Search of a Panacea: Japan-Korea Rapprochement and America's "Far Eastern Problems". *Pacific Historical Review*, Vol. 71, No. 4 (November 2002), pp. 633-662, 634-648.
- Yonhap. (2019, Agustus 13). *Japan OKs 1st shipment of hydrogen fluoride to S. Korea since export curbs*. Diambil kembali dari The Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190830000090>
- Yonhap. (2019, Agustus 15). *S. Korea expresses 'deep concerns' over Abe's offering to controversial war shrine*. Diambil kembali dari The Korean Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190815000018>
- Yonhap News Agency. (2020, Desember 22). *Over 70 pct of S. Koreans joined boycott of Japanese goods: survey*. Diambil kembali dari Yonhap News Agency: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20201222007600315>
- Yoshida, R. (2019, November 29). *Breaking down the issue of wartime labor that has rocked Japan-South Korea ties*. Diambil kembali dari Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/29/national/breaking-issue-wartime-labor-rocked-japan-south-korea-ties/>

الجمهورية الإسلامية الباندو